



**PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN  
INTERNAL DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Muhammad Fadil**

**NPM : 4316500121**

Diajukan Kepada :

**Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Pancasakti Tegal**

**2020**



**PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN  
INTERNAL DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Pesyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen  
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh:

**Muhammad Fadil**

**NPM : 4316500121**

Diajukan Kepada :

**Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Pancasakti Tegal**

**2020**



**PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN  
INTERNAL DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Muhammad Fadil**

**NPM : 4316500121**

Disetujui Untuk Ujian Skripsi

Tanggal : 20 Juli 2020

Dosen Pembimbing I

**Dr. Dien Noviany R., S.E., MM., Akt. CA**  
NIDN. 0628117502

Dosen Pembimbing II

**Teguh Budi Raharjo., S.E., M.M**  
NIDN. 0615057601

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Akuntansi

**Aminul Fajri, S.E., M.Si, Akt.**  
NIDN. 0602037002

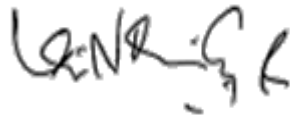
## HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI

Nama : Muhammad Fadil  
NPM : 4316500121  
Judul : Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal).

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, yang dilaksanakan pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 20 Juli 2020

Ketua Penguji,



**Dr. Dien Noviany R. S.E., M.M., Akt, C.A.**

NIDN. 0628117502

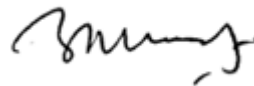
Penguji I



**Aminul Fajri, S.E., M.Si, Akt.**

NIDN. 0602037002

Penguji II



**Drs. Baihaqi Fanani, M.M., Akt**

NIDN. 0509086401

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Akuntansi



**Aminul Fajri, S.E., M.Si, Akt.**  
NIDN. 0602037002

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Bermanfaat Bagi Orang lain”.

### **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayah dan Bunda Tercinta
2. Kakak Adikku tercinta
3. Sahabatku
4. Universitas Pancasakti Tegal tempatku belajar

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fadil

NPM : 4316500121

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Auditing


Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal)”

1. Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan/atau pemalsuan data maupun bentuk-bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Saya mengizinkan untuk dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab.

Tegal, Juli 2020  
Yang Menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

**Muhammad Fadil**

## ABSTRAK

**Muhammad Fadil.** Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal).

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah desa dalam mengelola dana desa, 3) Untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mengelola dana desa.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuisioner. Sedangkan Metode analisis data yang digunakan adalah pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis

Kesimpulan penelitian ini membuktikan bahwa 1) sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa, artinya semakin baik penerapan sistem informasi akuntansi maka akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana juga akan semakin baik, 2) sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa, artinya semakin baik sistem pengendalian internal maka akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana juga akan semakin baik, 3) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa, artinya semakin baik sistem pengendalian internal maka akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana juga akan semakin baik.

**Kata Kunci:** Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Akuntabilitas Pemerintah Desa

## ABSTRACT

**Muhammad Fadil.** *The Influence of Accounting Information Systems, Internal Control Systems and Information Technology Utilization of Village Fund Management Accountability (Case Study in Kramat District, Tegal Regency).*

*The purpose of this study is 1) To find out and analyze the influence of Accounting Information Systems on village government accountability in managing village funds, 2) To find out and analyze the influence of village government internal control systems in managing village funds, 3) To find out and analyze the role of Information Technology Utilization in managing village funds.*

*This research method uses quantitative research. Data Collection Techniques used in this study were questionnaire methods. While the data analysis method used is classical assumption testing, multiple linear regression analysis and hypothesis testing*

*The conclusion of this study proves that 1) accounting information systems affect the accountability of village governments in managing the allocation of village funds, meaning that the better the application of accounting information systems, the accountability of village governments in managing the allocation of funds will also be better, 2) the internal control system influences government accountability villages in managing the allocation of village funds, meaning the better the internal control system, the accountability of the village government in managing the allocation of funds will also be better, 3) the use of information technology affects the accountability of the village government in managing the allocation of village funds, meaning that the better the internal control system, the accountability the village government in managing the allocation of funds will also be better.*

**Keywords:** *Accounting Information Systems, Internal Control Systems, Utilization of Information Technology, Village Government Accountability*



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi dengan judul “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal)”. Proposal skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Penulis menyadari bahwa dari awal proses hingga terselesainya proposal skripsi ini tidak lepas dari segala bantuan, bimbingan, dorongan, serta do'a dari berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Ak. C.A Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Aminul Fajri, S.E., M.Si., Akt. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Ak. C.A Selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan selalu memberikan bimbingan, nasehat dan dukunganya dengan sabar selama penulis menyelesaikan proposal skripsi ini
4. Bapak Teguh Budi Raharjo, SE, M.M Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan selalu memberikan bimbingan,

nasehat dan dukungannya dengan sabar selama penulis menyelesaikan proposal skripsi ini

5. Kedua Orang Tua saya yang telah memberikan dukungan berupa kasih sayang dan materi sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
6. Teman saya yang telah memberikan semangat dan dorongan untuk cepat menyelesaikan proposal ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh kelalaian dan keterbatasan waktu, tenaga juga kemampuan dalam penyusunan proposal skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mohon kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penyusunan proposal skripsi ini.

Tegal, Juli 2020  
Penulis,

**Muhammad Fadil**  
**NPM. 4316500121**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
1. Tujuan Penelitian .....	13
2. Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori .....	15
1. Teori Stewardship (Stewardship theory) .....	15

2. Sistem Informasi Akuntansi.....	17
3. Sistem Pengendalian Internal.....	21
4. Teori Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	28
5. Akuntabilitas.....	30
6. Alokasi Dana Desa.....	32
B. Penelitian Terdahulu .....	41
C. Kerangka Pemikiran Konseptual .....	45
D. Perumusan Hipotesis .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pemilihan Metode.....	53
B. Lokasi Penelitian .....	54
C. Teknik Pengambilan Sampel.....	54
1. Populasi.....	54
2. Sampel .....	55
D. Definisi Konseptual Dan Operasional Variabel .....	56
E. Teknik Pengumpulan Data .....	59
F. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis.....	60
1. Uji Kualitas Data .....	60
2. Pengujian Asumsi Klasik.....	61
3. Analisis Regresi Berganda.....	65
4. Pengujian Hipotesis .....	65
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Kecamatan Kramat .....	67

B. Hasil Penelitian.....	71
1. Deskripsi Responden .....	71
2. Pengujian Validitas.....	73
3. Pengujian Reliabilitas.....	75
4. Pengujian Asumsi Klasik.....	76
5. Analisis Regresi Berganda.....	79
6. Pengujian Parsial .....	81
7. Koefisien Determinasi.....	83
C. Pembahasan .....	84
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran .....	91
C. Keterbatasan Penelitian .....	92
 DAFTAR PUSTAKA .....	93
 LAMPIRAN.....	95

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu .....	41
3.1 Populasi penelitian .....	55
3.2 Definisi Operasional Variabel .....	58
4.1 Deskripsi Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	72
4.2 Deskripsi Responden berdasarkan Umur .....	72
4.3 Deskripsi Responden berdasarkan Pendidikan .....	73
4.4 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian.....	74
4.5 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian.....	76
4.6 Hasil Uji Normalitas .....	77
4.7 Hasil Uji Multikolinearitas.....	79
4.8 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda.....	80
4.9 Hasil Pengujian Parsial .....	81
4.10 Hasil Analisis Koefisien Determinasi .....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	51
4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	78

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Kuesioner Penelitian .....	96
2 Data Penelitian Variabel Sistem Informasi Akuntansi.....	101
3 Data Penelitian Variabel Sistem pengendalian Internal .....	102
4 Data Penelitian Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	103
5 Data Penelitian Variabel Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa .....	104
6 Hasil Pengujian Validitas .....	105
7 Hasil pengujian Asumsi Klasik Dan Pengujian Regresi .....	110



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perhatian terhadap desa di Indonesia meningkat dalam akhir tahun ini. Hal ini terjadi karena adanya penetapan peraturan pemerintah UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari akuntabilitas. Secara umum akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2015). Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa.

BPKP (2015: 1) menyatakan bahwa dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan dana desa kurang lebih sebesar Rp 20,776 triliun kepada 74.093 desa yang tersebar di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Pasal 29, formula pembagian dihitung berdasarkan jumlah desa, dengan bobot sebesar 90% dan hanya 10% yang dihitung dengan menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat

kesulitan geografi. Pemerintah lebih menekankan pada asas pemerataan, dimana setiap desa memiliki jumlah dana desa yang relatif sama. Tiap desa minimal menikmati dana desa sebesar Rp252,2 juta, apapun besaran/kebutuhan desa tersebut. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Pemerintahan Desa adalah tingkat pemerintahan terkecil yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Pemerintah desa juga dapat membantu pemerintah pusat dalam melakukan pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat secara langsung. Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi politik, dan kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain (Bastian 2015:6). Dalam melakukan kegiatannya memerlukan pengawalan, oleh karena itu pemerintah bersama dengan legislatif mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka pemerintah desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahannya secara keseluruhan dan bertanggungjawab.

Desa memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan

yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus bisa dipertanggungjawabkan.

Tanggungjawab yang dimaksud yaitu pertanggung-jawaban dalam mengelola dana desa. Kendala yang sering terjadi di sebagian besar desa yaitu terkait dengan keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dan pengeluaran. Kenyataan yang seperti itu disebabkan oleh empat faktor utama (Hidayana dan FPPD, 2016). Pertama: Desa mempunyai APBDes yang cenderung kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua: kesejahteraan masyarakat desa rendah. Ketiga: rendahnya dana operasional desa yang digunakan untuk menjalankan pelayanan desa. Ke empat: banyak program pembangunan yang masuk ke desa tetapi hanya dikelola oleh dinas.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki termasuk didalamnya Pengelolaan Keuangan Desa. Langkah nyata berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk meningkatkan daya saing masyarakat desa dari segi sumber daya khususnya modal untuk pengembangan desa dalam rangka menunjang dilakukannya pembangunan desa yaitu dengan mengalokasikan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak dan retribusi daerah (pasal 72 ayat(3)) dan Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) (pasal 72 ayat(4)), serta sumber daya lain yang berasal dari masyarakat maupun pendapatan lain yang sah (Hariani dan Sudrajat, 2016:114).

Pemberian dana dari pemerintah pusat ke desa yang sangat besar tentunya menuntut pertanggungjawaban yang besar pula. Di tahun 2015, telah dialokasikan dana desa oleh pemerintah pusat sebesar 20,7 Triliyun untuk 74.093 desa, ditahun 2016 sebesar 40,98 Triliyun untuk 74.754 desa, pada tahun 2017 kembali meningkat sebesar 60 Triliyun untuk beberapa desa yang

tersebar di seluruh Indonesia. Selain dana desa, terdapat pendapatan desa yang lainnya seperti alokasi dana desa, dana bantuan dari pemerintah provinsi/kota/kabupaten dan dana bagi hasil pajak/retribusi daerah.

Penggunaan Alokasi Dana Desa rawan terhadap kecurangan berupa penyelewengan dana oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Disinilah peran penting masyarakat sebagai pengawas langsung jalannya pemerintahan desa agar pembangunan desa dapat berjalan secara semestinya kearah yang lebih maju dapat dijalankan, masyarakat desa diharapkan bisa dengan seksama mengawasi jalannya pemerintahan desa agar kecurangan dapat diminimalisir. Hal ini dilakukan karena sebesar 70% dari Alokasi Dana Desa diperuntukn untuk kepentingan dan pemberdayaan masyarakat desa dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan ke sektor perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dala skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, honor tim pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatann desa lainnya yang dianggap penting untuk kemajuan desa. Sedangkan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penyelenggaraan pemerintah desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (Arista, 2017:15).

Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*). Jumlah dana desa yang sangat besar dan diprediksi akan terus bertambah besar di setiap tahunnya maka diperlukan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki entitas baik entitas bisnis maupun pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *shareholder*. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang bertugas untuk melayani masyarakat. Di sektor privat, akuntabilitas akan muncul secara otomatis apabila entitas telah atau dalam proses melakukan penerbitan efek di pasar modal dan entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat (Narsa dan Isnalita 2017).

Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat. Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dan transparansi dalam sebuah pemerintahan maka banyak faktor yang dapat memengaruhi kedua aspek tersebut. (Cheng, 2015) menyebutkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan turut memengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Lebih lanjut, Kalbers dan Forgy (2016) menambahkan selain adanya *internal*

*controlling* dalam sebuah pemerintahan turut mempengaruhi tingkat akuntabilitas dan transparansi public.

Di sisi lain berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2014 pemerintah Desa akan diberikan dana untuk dikelola guna membiayai penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Bila mengacu pada PP Nomor 60 tahun 2014 sudah cukup jelas bahwa alokasi dana yang diberikan ke masing-masing Desa sangat besar yakni dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis. Dana ini cukup besar untuk digunakan oleh pemerintah Desa guna memperbaiki kesejahteraan warga di Desa masing-masing. Secara umum pemerintah Desa masih belum bisa mengalokasikan dana Desa tersebut sehingga sering terjadi permasalahan dalam hal akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Kompetensi yang dimiliki oleh pemerintah Desa terkait pengelolaan dana Desa masih belum mampu mengelola dana tersebut. Pengetahuan akan mengelola dana desa bahkan membuat laporan keuangan masih sangat minim sehingga yang dikhawatirkan adanya sebuah *asymmetryinformation* yang terjadi atas laporan keuangan di publikasikan kepada publik. Penelitian sebelumnya telah banyak meneliti mengenai faktor-faktor yang bisa memengaruhi akuntabilitas, transparansi serta peran perangkat desa suatu organisasi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Diarapati (2017), Mada (2016), Hariyani (2016) dan Siswidiyanto (2016) yang membuktikan hasil yang beragam.

Penelitian ini menggunakan *accountability framework* yang dikembangkan oleh Iyoha dan Oyerinde (2015) untuk menginvestigasi secara komprehensif faktor-faktor yang dapat menentukan tingkat akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD). Lebih lanjut, Iyoha dan Oyerinde (2015) mengemukakan bahwa *accountability framework* yang dikembangkan merupakan tingkatan/level akuntansi agar akuntabilitas publik bisa berjalan dengan baik yang dimulai dari tahapan *accounting infrastructure* yaitu mengungkap tentang sejauh mana akuntan yang profesional mampu mengelola dana keuangan sehingga harapannya informasi yang dihasilkan menjadi tepat waktu, dapat diandalkan dan memadai. Lebih lanjut, tahapan selanjutnya adalah *accounting practice* dan *accounting culture*. Kedua poin ini menjadi fokus dalam *accountability framework* (Iyoha dan Oyerinde 2015) karena baik *accounting practice* dan *accounting culture* mengungkap bahwa dalam proses akuntabilitas pemerintahan dipengaruhi oleh standar akuntansi internasional yang harus diterapkan ke negara Indonesia, lebih khususnya lagi adalah pemerintah daerah. Selain itu, tingkatan akuntabilitas publik dipengaruhi oleh sistem informasi yang saling terintegrasi yang sebaiknya informasi tersebut tepat waktu, memadai, dapat diandalkan serta relevan dengan kebutuhan *stakeholders* dalam hal ini adalah rakyat (Iyoha dan Oyerinde 2015).

Dalam *accountability framework*, faktor individu dan sistem yang diterapkan dalam sebuah pemerintahan menjadi fokus penting dalam meningkatkan akuntabilitas. Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana



desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal. Namun tidak hanya itu sistem pengendalian yang digunakan juga sangat mendukung keberhasilan akuntabilitas desa. Dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Diorespati, 2017) serta melihat fenomena yang terjadi di lapangan maka peneliti merumuskan faktor-faktor kondisional yang terdiri atas kompetensi aparatur, dan sistem pengendalian serta Peran Perangkat Desa yang terlibat didalamnya. Kompetensi aparatur mejadi suatu faktor yang penting untuk dibahas mengingat kompetensi merupakan faktor internal dan menjadi suatu yang penting. Kompetensi aparatur di pemerintah desa tergolong masih sangat lemah ketika harus mengelola alokasi dana desa (ADD) yang terbilang cukup besar. Kondisi serupa dipertegas oleh (Leung dalam Diorespati, 2017) yang menjelaskan mengenai pentingnya peran auditor internal dalam mendukung *corporate governance* sebuah entitas. Namun agar peran auditor internal berhasil guna mendukung *corporate governance* maka diperlukan kompetensi yang cukup dalam menjamin keberhasilan manajemen dan integritas dalam suatu entitas.

Faktor kedua dalam mendukung akuntabilitas adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang merupakan bagian dari proses untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan publik, dinilai masih belum mampu untuk dapat memberikan akuntabilitas publik dengan adanya opini dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan oleh pemerintah. Berdasarkan sumber yang diperoleh di BPK terdapat hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Tegal masih terdapat kelemahan-kelemahan

dalam implementasi sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan, Hal ini mencerminkan bahwa tingkat pengendalian intern pemerintahan masih kurang efektif.

Faktor ketiga dalam mendukung akuntabilitas adalah peran perangkat desa, Peran perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa (Gunawan, 2015). Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik (Good Governance) yang bercirikan demokratis juga desentralistis.

Faktor kompetensi, sistem pengendalian dan peran perangkat desa yang telah diuraikan sebelumnya diduga dapat mempengaruhi tingkat akuntabilitas alokasi dana desa (ADD) Pemerintah Desa. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh seseorang dalam hal aparatur pemerintah, sistem pengendalian dari pihak internal yaitu inspektorat yang semakin tinggi maka dapat meningkatkan akuntabilitas Pemerintah desa terhadap publik. Level ini dapat dikategorikan sebagai bagian *accounting infrastructure*, *accounting culture*, dan *accounting practice* berdasarkan *accountability framework* yang dikembangkan oleh (Iyoha dan Oyerinde 2015).

Fenomena atau permasalahan disekitar yang berkaitan dengan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)

adalah banyaknya potensi penyalahgunaan dana desa. Sebanyak 14 kepala desa di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah tersangkut kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD). Kasus tersebut telah ditangani Kejaksaan Negeri Purworejo. Salah satu bentuk penyelewengannya yaitu kegiatan fiktif, mark up harga, mark up jumlah pengeluaran, belanja fiktif, tidak ada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, dan penggunaan dana untuk keperluan pribadi dan golongan. Sementara di kabupaten Brebes, kepala desa Cipelem, Kecamatan Bulakamba, Jawa Tengah, Alifudin ditahan Kejaksaan Negeri Brebes karena telah merugikan negara sebanyak Rp.281 juta atas kasus dugaan korupsi dana desa anggaran tahun 2016 yang lalu sebesar Rp.882 juta. Dari sejumlah bentuk korupsi tersebut, ada 5 titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan dana desa yaitu proses perencanaan, proses pertanggungjawaban, proses monitoring dan evaluasi, proses pelaksanaan dan proses pengadaan barang dan jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan dana desa (Medistira, 2017).

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai Akuntabilitas Pemerintah Desa terdapat hasil yang berbeda-beda, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Diarespati (2017) menunjukkan faktor Kompetensi Aparatur Desa secara signifikan tidak mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan faktor Sistem Pengendalian Internal secara signifikan mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian dari Sarifudin Mada (2016) menunjukkan bahwa: 1) Kompetensi aparat pengelola dana desa

berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 2) Komitmen Organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 3) Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Neny Tri Indrianasari (2017) menunjukkan Perangkat Desa cukup berperan positif dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang memberikan hasil beragam (riset gap). Maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “**Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studikasus di Di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal)**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, Maka perumusan masalah yang dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal?

2. Apakah terdapat pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal?
3. Apakah terdapat pengaruh Peran Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah :

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah desa dalam mengelola dana desaa.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mengelola dana desa.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### A. Aspek Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan lebih banyak wawasan tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa.
- b. Diharapkan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan.

## B. Aspek Teori tis

### a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dari teori yang diterima sehingga diperoleh kriteria daerah berdasarkan rasio kemandirian, rasio kemampuan dll.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Stewardship (Stewardship theory)

*Stewardship theory* merupakan bagian dari teori agency. Menurut (Donaldson & Davis, 1989) teori *stewardship* menggambarkan suatu keadaan dimana seorang manajer lebih mengutamakan kepentingan organisasi untuk tujuan utamanya bukan termotivasi terhadap kepentingan individu. Teori *stewardship* didasari atas teori psikologis serta sosiologi para pemikir akuntansi manajemen. Teori *stewardship* memberikan sebuah asumsi filosofi dari sifat manusia yaitu dapat dipercaya, bertanggung jawab, jujur serta memiliki integritas atas setiap aktivitas yang dilakukannya. Berdasarkan teori *stewardship* menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Keberhasilan organisasi dapat dicapai dengan cara memaksimalkan utilitas *steward* dan *principal*.

Tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik menjadikan *principal* semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi – fungsi pengelolaan. Sehingga diperlukan adanya pemisahan antara fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan, keterbatasan yang dimiliki *principal* mengakibatkan adanya pemberian amanah terkait pengelolaan sumber daya tersebut kepada *Steward*. Teori *stewardship* menjelaskan bentuk

pola kepemimpinan dan hubungan atasan dengan bawahannya dalam sebuah organisasi menggunakan mekanisme situasional. Kepala Desa dan Perangkat Desa (*Stewards*) cenderung termotivasi untuk berlaku sesuai keinginan dari Pemerintah (*principals*). Menurut Teori *stewardship* kepentingan bersama adalah dasar seorang *Stewards* melakukan tindakan. Sehingga apabila terdapat perbedaan kepentingan antara *principals* dan *stewards*, maka *steward* akan berusaha bekerjasama untuk bertindak sesuai dengan tindakan *principals* dan demi kepentingan bersama agar tercapainya tujuan bersama. Hal penting dalam *Stewardship theory* adalah *stewards* menyelaraskan tujuan sesuai tujuan *principals* namun bukan berarti *steward* tidak memiliki kebutuhan.

Penerapan Teori *stewardship* digunakan karena kepercayaan dari *principals* yang diberiksan kepada Pemerintah Desa (*Stewards*) dapat terjadi jika bertindak sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang muncul, yaitu kepentingan publik pada umumnya. Penggunaan teori *Stewardship* pada organisasi Pemerintahan Desa adalah untuk mendeskripsikan eksistensi pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik yang dapat dipercaya, menampung aspirasi masyarakatnya, memberikan pelayanan yang baik, dan dapat mempertanggung jawabkan apa yang diamanahkan kepadanya. Sehingga tujuan organisasi untuk mensejahterakan masyarakatnya dapat dicapai secara maksimal.



## 2. Sistem Informasi Akuntansi

Pengetahuan akan teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh seseorang yang bekerja di instansi pemerintahan. Selain itu juga pengetahuan akan teknologi informasi merupakan modal utama untuk dapat bersaing di era globalisasi dan kemajuan zaman yang akan datang. Untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik dapat dimulai dengan mengawal proses perencanaan, penganggaran hingga realisasi yang melibatkan peran aktif masyarakat. Sebagai pihak yang berwenang mengatur kebijakan desa, perangkat desa menjadi ujung tombak perubahan.

Maka perlu peningkatan kapasitas untuk dapat menyandingkan sistem penunjang keputusan berbasis pada data, mengelola media sebagai publikasi informasi dan juga peningkatan keahlian berakuntansi. Penggunaan dan pembuatan sistem dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah desa untuk mengatur, mengendalikan data yang banyak, meminimalisir kesalahan dan menjaga konsistensi antar proses. Desa akan mempunyai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Adanya tambahan dana tersebut diharapkan pemerintah desa akan semakin mampu dalam membangun serta memberdayakan masyarakat desa (Faozi 2015). Namun demikian, banyak pihak menganggap kemampuan para aparat desa di daerah yang masih rendah dan belum siap dalam hal pengelolaan dana desa, akan ada risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal itu terjadi karena pemerintahan desa yang akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten) mengandung konsekuensi harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan.

Sama halnya dengan sistem informasi akuntansinya, masih banyak yang menganggap lemah dan belum sesuai dengan Sistem Informasi Akutansi itu sendiri. Dalam hal pengurusan dan pengelolaan dana desa, SIA sangat perlu dilakukan karena akan menentukan bagaimana pengelolaan serta penggunaan dana desa dengan baik. Dalam hal ini, SIA dapat diartikan adalah catatan dan laporan koordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan desa yang dibutuhkan oleh pemerintah desa guna memudahkan pengelolaan dana desa yang ada.

Sistem Informasi Akuntansi yang sudah memenuhi kriteria dan sudah sesuai dengan ketentuan, diharapkan dapat mencegah terjadinya kekeliruan yang bisa merugikan negara dalam hal ini dana yang telah diterima desa, serta mencegah terjadinya penyelewengan dana desa dan pelaksanaan pembangunan akan terus meningkat sehingga akan memberikan keuntungan bagi desa dan masyarakat. Sistem Informasi Akuntansi pada pengelolaan dana desa akan memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap ketidakstabilan pengelolaan dana desa yang ada serta Sistem Informasi Akuntansi yang baik akan berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dana desa yang ada di desa tersebut. Widjajanto (2000:11) mengemukakan bahwa Setiap organisasi yang menggunakan komputer untuk memproses data transaksi memiliki fungsi sistem informasi.

Fungsi sistem informasi adalah bertanggungjawab untuk pengolahan data. Pengolahan data merupakan aplikasi sistem informasi akuntansi yang paling mendasar dalam setiap organisasi. Fungsi sistem informasi dalam organisasi telah berevolusi dari struktur organisasi sederhana yang meliputi beberapa orang saja sampai struktur yang kompleks yang meliputi banyak spesialis yang bermutu.

Mulyadi (2006:3) menyatakan sistem informasi akuntansi mempunyai 3 fungsi penting :

- a. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, sumberdaya yang dipengaruhi oleh aktivitas tersebut, agar pihak manajemen, para pegawai dan pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang.
- b. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- c. Menyediakan data pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi. Termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan.

Menurut “Susanto,Azhar (2008;16) komponen dalam sebuah informasi akuntansi yang terintegrasi dalam sebuah sistem yang bekerja secara harmonis dalam rangka menghasilkan informasi yang dapat diandalkan oleh para pemakai”. Komponen sistem informasi akuntansi adalah :

- a. Sumber daya manusia (SDM) yang terlebih serta memahami bisnis proses akuntansi dan keuangan secara umum, misalnya *Accounting* atau pelaku yang menjalani sistem.
- b. Transaksi merupakan objek dari sistem informasi akuntansi sebagai masukan, lalu di proses hingga menghasilkan informasi.
- c. Prosedur keuangan dan akuntansi adalah langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan transaksi atau kegiatan perusahaan.

- d. Formulir data keuangan, untuk mencatat seluruh aktifitas keuangan meliputi transaksi kas, persediaan, piutang, aktiva tetap, hutang, penjualan dan biaya.
- e. *Accounting* software atau perangkat lunak sistem informasi akuntansi merupakan sekumpulan perangkat lunak yang digunakan untuk mengendalikan sistem komputer yang meliputi sistem operasi, dan perangkat lunak aplikasi.
- f. Hardware yaitu perangkat keras berupa perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan, dan kelengkapan aksesoris pendukung lainnya, diterapkan dan kemampuan keuangan suatu perusahaan atau instansi.

### 3. Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan instrumen terpenting yang dapat menyediakan *reasonable assurance* (jaminan yang layak) mengenai pencapaian dari tujuan atas kategori tertentu. Melaksanakan pengendalian Internal adalah alasan utama untuk memastikan proses pencapaian tujuan dapat terlaksana dan mengurangi berbagai risiko yang tidak diinginkan.

Pengendalian internal terdiri atas lima komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, kegiatan informasi dan komunikasi, serta pengawasan (Arens *et al.*,

2015) yang dapat diterapkan pada organisasi privat maupun publik, yang berorientasi pada profit ataupun tidak. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian, merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian suatu organisasi dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Penilaian risiko, merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya situasi yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
3. Kegiatan pengendalian, merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penerapan dan pelaksanaan kebijakan secara efektif.
4. Informasi dan komunikasi, informasi merupakan data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

5. Pemantauan, merupakan proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Inspektorat daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP pada bagian kedua mengenai Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Inspektorat daerah merupakan pengawas internal (internal auditor) dalam pemerintah daerah. Sebagai pengawas internal, keberadaan inspektorat daerah dinilai sangat penting dilihat juga dari fungsi dasarnya yaitu melakukan pengawasan pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pengawasan pemerintah meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui

evaluasi dan perbaikan pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola pemerintahan (Aikins 2015).

Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberi keyakinan yang memadai tentang: kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Adapun unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan Pemantauan Pengendalian Intern.

Terdapat unsur-unsur pokok sistem pengendalian intern yang menunjang perbaikan suatu sistem dalam suatu perusahaan, yang menurut Mulyadi (2015:164-172) adalah sebagai berikut:

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

Struktur organisasi merupakan rerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Struktur organisasi suatu perusahaan dibuat untuk membantu kelancaran kegiatan dan aktivitas perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya, karena dalam organisasi ini para karyawan saling bekerja sama dengan keahlian dan kemampuan yang berbeda.



2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.

Di dalam suatu organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang berwenang. Tidak ada satu pun transaksi yang terjadi apabila tidak diotorisasi oleh yang memiliki wewenang terhadap transaksi tersebut. Untuk itu, organisasi harus dirancang sistem yang mengatur pembagian wewenang otorisasi atas terlaksananya suatu transaksi. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan merupakan salah satu unsur pengendalian intern yang bertujuan untuk melindungi kekayaan, hutang, pendapatan, dan biaya yang ada di dalam suatu perusahaan. Dengan otorisasi yang jelas, maka setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan akan dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya sebab hanya dengan otorisasi dari pejabat yang berwenang maka transaksi itu akan terjadi. Pemberian otorisasi terhadap suatu transaksi yang terkait dengan penggunaan formulir, karena formulir merupakan media yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi dalam organisasi.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

Unsur praktik yang sehat merupakan unsur sistem pengendalian intern yang sangat erat hubungannya dengan unsur

pembagian tanggung jawab dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan. Hal ini disebabkan pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang serta prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak diterapkan suatu cara yang dapat menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Diantara 4 unsur pokok pengendalian intern tersebut diatas, unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian intern yang paling penting. Karena bagaimana pun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya.

Tujuan sistem pengendalian intern menurut Mulyadi (2015:163) yang meliputi tujuan pokok sistem pengendalian intern adalah:

1. Menjaga kekayaan organisasi.
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
3. Mendorong efisiensi.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Tujuan pengendalian intern menurut Baridwan (2016:13) adalah sebagai berikut:

1. Menjaga keamanan harta milik pemerintah desa.
2. Memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi.
3. Meningkatkan efisiensi dalam operasi.
4. Membantu menjaga agar tidak timbul penyimpangan dari kebijakan manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Dari berbagai penjelasan mengenai tujuan sistem pengendalian intern yang dinyatakan oleh para ahli di atas maka dapat disimpulkan kembali mengenai makna dari tujuan-tujuan di atas yaitu:

1. Menjaga keamanan harta-harta milik pemerintah desa.

Apabila harta-harta milik perusahaan tidak dilindungi dengan pengendalian intern yang memadai kekayaan fisik dapat dicuri, disalah gunakan atau rusak tanpa disengaja. Demikian pula halnya dengan kekayaan fisik seperti aktivitas usaha, dokumen-dokumen penting dan keandalan data akuntansi juga harus dilindungi secara baik dan benar.

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

Agar dapat menyelenggarakan dengan baik, madan mengelola dana desa dengan baik, jajaran staf desa harus mempunyai informasi yang akurat. Berbagai informasi yang penting dibutuhkan untuk mengambil keputusan.

3. Mendorong efisiensi.

Pengendalian intern dalam suatu pemerintahan desa dimaksudkan untuk menghindari pengulangan kesalahan yang tidak perlu dan

pemborosan dalam seluruh aspek pengelolaan dana desa, serta mencegah penggunaan sumber daya secara tidak terkendali.

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Manajemen yang dimaksudkan adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat berbagai materi dan prosedur untuk mencapai tujuan pemerintahan. Sistem pengendalian intern yang dimaksud untuk memastikan bahwa segala peraturan dan prosedur ini bisa dilakukan dan ditaati oleh pelaksana pemerintahan desa.

#### **4. Teori Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dengan jalan membangun jaringan sistem informasi dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Saat ini, pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi suatu kebutuhan pokok yang dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas harian aparat pemerintah secara optimal, akurat dan tepat waktu. Salah satunya adalah membuat laporan keuangan yang diisi dengan informasi-informasi keuangan yang akurat yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Pemanfaatan adalah turunan kata dari “Manfaat”, yakni suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian yang hal-hal berguna baik dipergunakan secara langsung

maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemanfaatan adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan: pemanfaatan sumber alam untuk pembangunan. Jadi, dapat disimpulkan pemanfaatan merupakan menggunakan atau memakai suatu hal yang berguna yang dalam hal ini adalah menggunakan atau memakai komputer sebagai media dalam menyampaikan informasi kepada publik. Pemanfaatan bisa diartikan aktivitas menggunakan proses sumber dan untuk belajar.

Selanjutnya Teknologi Informasi (TI) dilihat dari penyusunannya adalah teknologi dan informasi. Kata Teknologi bermakna pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, kata teknologi berdekatan artinya dengan istilah tata cara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi”.

Sumber lain yakni Romney dan Steinbart (2015:4) menyatakan bahwa :

Perancangan sistem informasi menggunakan teknologi informasi (TI – *information technology*) untuk membantu mengambil keputusan

menyaring dan meringkas informasi secara efektif. Teknologi informasi ini merupakan komputer dan perangkat elektronik yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, mentransmisikan, dan memanipulasi data. Menurut Abdul Kadir dan Terra Ch Triwahyuni (2015:2), mendefinisikan Teknologi informasi adalah seperangkat yang membantu melakukan pekerjaan dengan informasi dan melakukan tugas- tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi.

Menurut penelitian Hanoni (2016), pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi adalah perilaku sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. Menurut Afrianti (2015),” Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.”

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akuntansi adalah perilaku/sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk membantu mempermudah dalam proses penyusunan laporan keuangan desa dan meningkatkan kinerjanya.

## **5. Akuntabilitas**

Konsep mengenai akuntabilitas merupakan suatu konsep yang harus dilaksanakan baik terhadap entitas swasta maupun publik. Boven (2016) menambahkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk interaksi

antara pihak pengelola dan masyarakat/forum. Pengelola memiliki kewajiban untuk memberikan suatu penjelasan kepada masyarakat/forum terkait keadaan yang sebenarnya terjadi di organisasi. Hal ini penting mengingat publik, selaku prinsipal perlu mengetahui segala sesuatu yang terjadi di masyarakat/publik.

Lebih lanjut, Iyoha dan Oyerinde (2015) menambahkan bahwa bahwa tingkat akuntabilitas akan sangat memengaruhi kepuasan/*satisfaction* dari publik, sehingga peran dari *agent* (pihak pengelola) menjadi penting agar tingkat akuntabilitas. Konsep mengenai akuntabilitas merupakan suatu konsep yang harus dilaksanakan baik terhadap entitas swasta maupun publik. Boven (2016) menambahkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk interaksi antara pihak pengelola dan masyarakat/forum. Pengelola memiliki kewajiban untuk memberikan suatu penjelasan kepada masyarakat/forum terkait keadaan yang sebenarnya terjadi di organisasi.

Hal ini penting mengingat publik, selaku prinsipal perlu mengetahui segala sesuatu yang terjadi di masyarakat/publik. Lebih lanjut, Iyoha dan Oyerinde (2015) menambahkan bahwa bahwa tingkat akuntabilitas Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang

meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Sulistiyani (2015) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

#### **6. Alokasi Dana Desa.**

Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada Desa yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah



yang diterima oleh Kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan:

- a) Seluruh kegiatan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- b) Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- c) Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
- d) Alokasi Dana Desa harus di catat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- e) Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip : dari, oleh dan untuk masyarakat.

Tahap-tahap pengelolaan dana desa yang baik dan benar meliputi :

#### 1 Tahap Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (Sujarweni, 2015 : 18). Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- 3) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lama bulan oktober tahun berjalan.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau Sebutan Lain.

- 5) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 6) Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 7) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- 9) Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

- 10) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

## 2 Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Sujarweni, 2015:19). Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

- 1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- 4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- 5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
- 6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- 7) Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- 8) Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- 9) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
- 10) Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja; dan lampiran bukti transaksi.
- 11) Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Kepala Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

- 12) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
- 13) Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 3 Tahap Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes (Hamzah, 2015 : 35). Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

#### 1) Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktifitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

#### 2) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

#### 3) Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

#### 4. Tahap Pelaporan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

- 1) Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
  - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

- b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
  - 2) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
  - 3) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
  - 4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.
7. Tahap Pertanggungjawaban

Perrmendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
  - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan.
  - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
  - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.



- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Diarespati(2017)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	Hasil penelitian menunjukkan faktor Kompetensi Aparatur Desa secara signifikan tidak mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan faktor Sistem Pengendalian Internal secara signifikan mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)
Shelvia Rezeki dan Iwin Arnova (2019)	Sistem Informasi Akuntansi Alokasi Dana Desa Di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah	Hasil penelitian menunjukkan Sistem informasi akuntansi di desa Tanjung Dalam sudah berjalan baik, pihak yang bersangkutan dalam SIA sudah memenuhi persyaratan dan sudah memahami bagaimana SIA itu dilakukan. Sedangkan pihak yang terlibat dalam SIA itu sendiri yaitu kepala desa, bendahara desa dan sekretaris desa. Unsur sekretariat berkedudukan sebagai pembantu dan berada dibawah kepala desa, sekretaris desa mempunyai tugas membantu kepala desa dibidang pembinaan dan pelayanan teknis administrasi
Astuti (2016)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara pengendalian akuntansi terhadap

	Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survei Pada Dinas Kota Bandung)	akuntabilitas kinerja sebesar 0,625 yang bernilai positif. Terdapat pengaruh antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebesar 42,50 % artinya sistem pengendalian intern memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 42,50% pada instansi pemerintah diseluruh dinas yang ada di Kota Bandung. Untuk variabel pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja sebesar 0,707 yang bernilai positif sedangkan pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebesar 50,00% pada instansi pemerintah diseluruh Dinas yang ada di Kota Bandung.
Davis BudiPurnama, Hendy Widiastoeti (2015)	Audit Internasional Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Menilai Akuntabilitas Kinerja Desa (Di Desa Batakan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro) Tahun 2015	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban telah memenuhi prosedur yang berlaku. Masalah yang muncul adalah kurangnya koordinasi antar anggota Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) serta penyampaian laporan pertanggung jawaban yang terlambat.
Komang(2014)	Pengaruh Sistem Pegendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan dari sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pengawasan keuangan daerah, sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai

		informasi keuangan dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pada SKPD di Kabupaten Buleleng.
Rias Sukma Larasati, Agus Endro Suwarno (2019)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi Dan Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi (X1) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Y) di Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, artinya akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) akan semakin meningkat, apabila pemanfaatan teknologi informasi akuntansi semakin ditingkatkan dan selalu di perbarui secara berkala agar selalu mengikuti perkembangan teknologi.</p> <p>Kompetensi Perangkat Desa (X2) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Y) di Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, artinya semakin baik kompetensi perangkat desa akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD).</p>
Dwi Sapartiningsih, Suharno, Djoko Kristianto (2016)	Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, artinya apabila pemanfaatan teknologi informasi meningkat maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana

		desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen.
Widyatama (2017)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi dana Desa	Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi
Yudianto (2017)	Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di desa kamantran kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Dan penelitian ini juga menggunakan *accountability framework*(*accountability infrastructure, accountability practice* dan *accountability culture*) untuk mengetahui Sejauh mana level penerapan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal tersebut dan Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi mengenai pemanfaatan teknologi

informasi untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

### **C. Kerangka Pemikiran Konseptual**

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting didalam penelitian. Kerangka berpikir yang sempurna akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang akan dijadikan sebagi objek penelitian. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Oleh karena itu, setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir (Sugiyono, 2010:60)

#### **1 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa**

Dalam hal pengurusan dan pengelolaan dana desa, SIA sangat perlu dilakukan karena akan menentukan bagaimana pengelolaan serta penggunaan dana desa dengan baik. Dalam hal ini, SIA dapat diartikan sebagai catatan dan laporan koordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan desa yang dibutuhkan oleh pemerintah desa guna memudahkan pengelolaan dana desa yang ada. Ratih (2016) menyatakan bahwa rancang bangun dan pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah menjadikan sebuah proses menjadi mudah dan cepat

serta kemampuan penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja SKPD.

Sudana (2015) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem aplikasi terkomputerisasi yang mampu melakukan pengolahan data transaksi keuangan perusahaan secara terintegrasi. Rusmayanti *et al.* (2016) menyatakan bahwa adanya sistem pengelolaan keuangan di Desa, Kaur Keuangan menjadi lebih terbantu. Penyimpanan data pengelolaan keuangan tidak membutuhkan berkas banyak dan data bisa digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama. Sistem Informasi Akuntansi pada pengelolaan dana desa akan memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap ketidakstabilan pengelolaan dana desa yang ada serta Sistem Informasi Akuntansi yang baik akan berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dana desa yang ada di desa tersebut.

### 3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa.

Pengendalian internal yang efektif dapat meningkatkan praktek tata kelola yang baik dan menurunkan korupsi di Ghana (Mensah, *et al.*, 2015). Al-Zwyalif (2015) juga mengemukakan hal yang senada bahwa pengendalian internal memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan pilar *corporate governance* pada perusahaan asuransi di Yordania dan keberhasilan *corporate governance* membutuhkan kepatuhan terhadap seluruh unsur pengendalian internal. Sedangkan

menurut Mehaela dan Iulian (2015) menyatakan bahwa *corporate governance* dan pengendalian internal tidak boleh dilihat secara terpisah. Sebuah organisasi tanpa sebuah cara pandang pemimpin jangka panjang yang efisien, mekanisme pengendalian internal yang efektif tidak akan dapat bertahan. Oleh karena itu *corporate governance* tidak akan berjalan efektif tanpa pengendalian internal yang baik.

Inspektorat daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP pada bagian kedua mengenai Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Inspektorat daerah merupakan pengawas internal (internal auditor) dalam pemerintah daerah. Sebagai pengawas internal, keberadaan inspektorat daerah dinilai sangat penting dilihat juga dari fungsi dasarnya yaitu melakukan pengawasan pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pengawasan pemerintah meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui evaluasi dan perbaikan pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola pemerintahan (Aikins 2016).

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendefinisikan Sistem Pengendalian Internal pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang

memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan Aparat Pegawai Instansi Pemerintah sebagai salah satu sarana pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa SPIP memiliki peran penting dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Teori agensi pihak *principal* adalah pihak yang memberi mandat kepada pihak lain yaitu *agents* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Penyimpangan dan kebocoran masih banyak ditemukan di dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal dibutuhkan untuk meminimalkan adanya kecurangan dalam suatu sistem. Sistem Pengendalian Internal dapat memberi keyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal maka dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Semakin baik Sistem Pengendalian Internal maka semakin baik Akutabilitas pengelolaan Dana Desa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyatama, et al (2017) dan Yudiantoro (2017) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal



Aparatur dari Pemerintah Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

#### 4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa

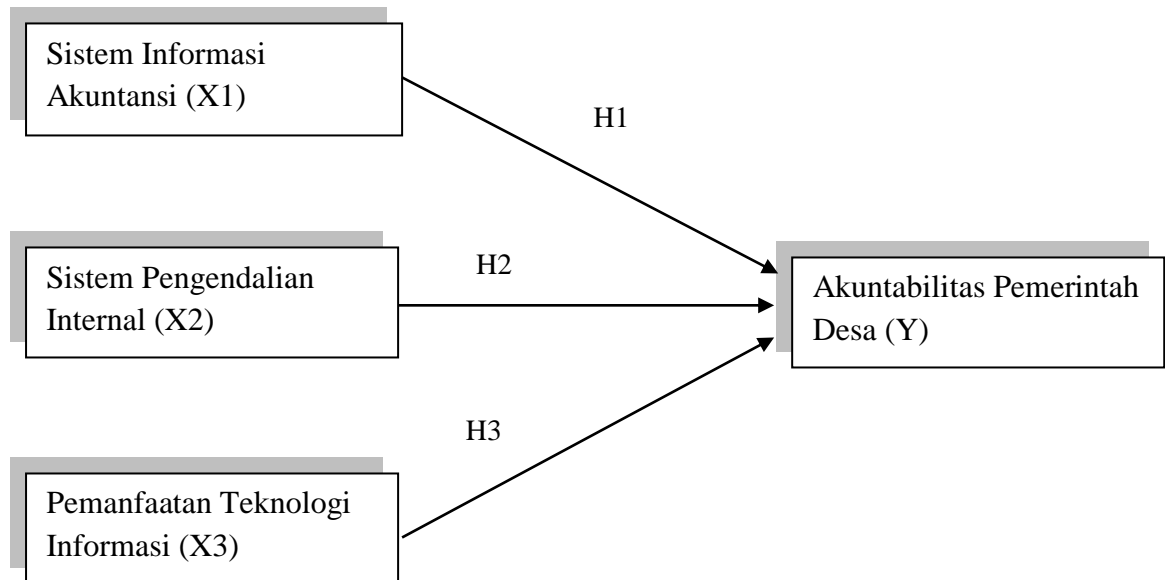
Teknologi informasi digunakan oleh sebuah organisasi untuk pemrosesan, dan penyimpanan informasi, serta berfungsi sebagai penyebaran informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meringankan dan membantu tugas yang dilakukan seperti halnya penyusunan laporan keuangan. (Rahadi, 2017) menyatakan bahwa Teknologi Informasi mempunyai manfaat atau kemudahan bagi seseorang dalam menghemat waktu maupun tenaga. Begitupula pada tingkat pemerintahan desa, pemanfaatan teknologi digunakan oleh aparat desa dalam mengelola data dan menyimpan informasi. Teknologi informasi ini juga dapat digunakan sebagai media meminimalisir kesalahan yang terjadi, baik yang disengaja ataupun yang disengaja.

Berdasarkan *Stewardship theory, principals* yaitu pemerintah berhak meminta pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa dari Pemerintahan Desa. Oleh karena itu Pemerintah Desa memiliki kewajiban membuat laporan sesuai dengan peraturan serta tidak mengandung unsur yang membingungkan bagi para pemakai laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah desa nantinya akan diberikan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi.

Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi menjadikan laporan keuangan disusun secara lebih andal dan relevan. Teknologi informasi mempermudah integrasi pelaporan dari Pemerintah Desa (*steward*) ke Pemerintah (*principals*). Dengan demikian pemanfaatan teknologi informasi akan meminimalisir keterlambatan pelaporan kinerja pengelolaan dana desa.

Penelitian Sugiarti & Yudianto (2017), Jannah, dkk (2018) dan Sapartiningsih, dkk (2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemanfaatan teknologi informasi menjadikan informasi yang didapat semakin relevan dan pendistribusian informasi lebih efektif. Sehingga dengan demikian akan meminimalisir kecurangan dalam pengalokasian dana desa.

Berdasarkan pemikiran diatas maka kerangka berpikir dalam penelitian ini bisa digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran

#### D. Perumusan Hipotesis

**Hipotesis merupakan** jawaban sementara atas suatu persoalan yang masih perlu dibuktikan kebenarannya dan harus bersifat logis, jelas dan dapat diuji. Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa

- H2 : Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa
- H3 : Peran teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pemilihan Metode**

Metode penelitian menurut Sugiyono (2013:2), adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan pernyataan tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, kegunaan dan tujuan. Menurut Darmadi (2015:153), Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis.

Berdasarkan pemaparan pengertian Metode penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010:8) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, dan digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah respon aparat desa Kemantran Kecamatan kramat mengenai Kompetensi,Sistem Pengendalian Internal dan Peran Perangkat Desa untuk dianalisis guna

mengetahui signifikansi hubungannya dengan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

## **C. Teknik Pengambilan Sampel**

Menurut Nasution (2013:43) Teknik Pengambilan Sampel merupakan cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Populasi dan Sampel pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Populasi**

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2015:173). Populasi pada penelitian ini adalah Aparatur desa di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal terdapat 10 desa dan setiap desa diambil 3 orang Aparatur Desa yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini. Dua orang Aparatur Desa tersebut yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, dan bendahara Desa. Sehingga populasi dalam penelitian ini berjumlah 30 orang. Berikut ini adalah nama desa di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

Tabel 3.1  
Populasi penelitian

No	Nama Desa	Jumlah Responden
1	Babakan	3
2	Bongkok	3
3	Dinuk	3
4	Jatilawang	3
5	Kematran	3
6	kepunduan	3
7	Kertaharja	3
8	Kertayasa	3
9	Ketileng	3
10	Mejasem barat	3
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>

Sumber : diolah untuk penelitian

## 2. Sampel

Menurut Arikunto (2015:174) Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi penelitian. Penelitian bisa dinamakan sebagai penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan pertimbangan jika populasi yang ada sangat besar jumlahnya, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian di semua populasi yang ada, sehingga dibentuklah sampel yang nantinya dijadikan sebagai perwakilan dari populasi yang ada. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampel jenuh dimana semua populasi digunakan sebagai sampel dengan jumlah 30 orang. Alasan peneliti mengambil teknik sampel jenuh dikarenakan jumlah populasi yang cenderung relatif

kecil dan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang populasi.

## **D. Definisi Konseptual Dan Operasional Variabel**

### **1. Definisi Konseptual Variabel**

Definisi konseptual variabel adalah penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas, padat dan tegas. Ada dua jenis variabel dalam penelitian ini yaitu:

#### **a. Variabel Dependen**

Menurut Sugiyono (2010:4) Variabel dependen juga biasa disebut sebagai variabel kriteria, output dan konsekuen. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan variabel dependen yaitu Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa.

Akuntabilitas merupakan wujud dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik/berkala (Ulum, 2010:40).

#### **b. Variabel Independen**

Menurut Sugiyono (2010:4) Variabel Independen juga biasa disebut dengan variabel prediktor, stimulus, antesenden. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan variabel independen yaitu



Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal dan Peran Perangkat Desa.

1. Kompetensi adalah kemampuan melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan, didukung sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut (Sedarmayanti, 2011:57)
2. Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan (Hartadi, 2009:91).
3. Peran Perangkat Desa yaitu bagaimana keterlibatan perangkat desa dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada di desa tersebut. Selain berperan dalam menjalankan roda pemerintahan perangkat desa juga memiliki peran dalam pengelolaan alokasi dana desa yang cukup besar.

## **2. Definisi Operasional**

Definisi operasional variabel adalah batasan pengertian tentang variabel penelitian yang didalamnya sudah mencerminkan indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel yang bersangkutan. Berdasarkan variabel-variabel dalam penelitian ini, akan dirumuskan kedalam masing-masing indikator yang merupakan ciri-ciri

dari variabel tersebut. Operasionalisasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Definisi Operasional Variabel

<b>Variabel</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala Pengukuran</b>
Sistem informasi Akuntansi	Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, sumberdaya yang dipengaruhi oleh aktivitas tersebut agar pihak manajemen, para pegawai dan pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang	1. Perencanaan 2. Keputusan	Interval
	Menyediakan data pengendalian yang memahami untuk menjaga aset-aset organisasi	1. Ketelitian 2. Pertanggung jawaban keuangan	Interval
Sistem pengendalian internal	Lingkunga pengendalian	1. Kebijakan kepala desa 2. Peran BPD	Interval
	Penilaian resiko	1. Sistem informasi yang baru 2. Perubahan dalam lingkungan operasi	Interval
	Kegiatan pengendalian	1. Pengendalian SISKU 2. Pemahaman pengelolaan dana desa	Interval
	Informasi dan komunikasi	1. Kejelasan 2. Konsistensi	Interval
	Pemantauan	1. Penilaian aktivitas 2. Fungsi intrnal audit	Interval

Penerapan teknologi informasi	Hadware	1. Komputer 2. Jaringan internet	Interval
	Software	1. Kesempurnaan sistem 2. Kemampuan SDM dalam menjalankan perangkat lunak	Interval
Akuntabilitas dana desa	Tahap perencanaan	1. Lembaga desa 2. Masyarakat umum	Interval
	Tahap Pelaporan	1. Laporan realisasi 2. Laporan akhir tahun	Interval
	Tahap pertanggung jawaban	1. Ketelitian 2. Transparan	Interval

Sumber : diolah untuk penelitian

### E. Teknik Pengumpulan Data

Agar bisa mendapatkan data yang valid, akurat dan relevan maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kuisisioner. Menurut Arikunto (2015:194) Kuisisioner merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang dia ketahui. Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner dengan lima alternatif jawaban yang menggunakan *skala likert* dengan skoring :

- A. Jawaban SS (Sangat Setuju) diberi skor 5
- B. Jawaban S (Setuju) diberi skor 4
- C. Jawaban KS (Kurang Setuju) diberi skor 3
- D. Jawaban TS (Tidak Setuju) diberi skor 2
- E. Jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) diberi skor 1

#### F. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis

Penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik yang menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis dengan menggunakan *Statistical Package for Social Science (SPSS) Ver 22*.

##### 1. Uji Kualitas Data

###### a. Pengujian Validasi

Pengujian Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu butir pertanyaan. Skala butir pertanyaan disebut valid, jika melakukan apa yang seharusnya diukur. Jika skala pengukuran tidak valid maka tidak bermanfaat bagi peneliti, sebab tidak mengukur apa yang seharusnya dilakukan (Sunyoto, 2012:55).

Kecermatan dan ketepatan suatu alat ukur dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat ukur tersebut dapat

menjalankan alat fungsi ukurnya, atau memberikan hasil pengukuran yang sesuai dengan maksud pengukuran tersebut. Metode yang paling sering digunakan untuk memberikan penilaian dengan validitas kuisioner adalah korelasi produk momen (*moment product correlation, Pearson correlation*) antara skor disetiap butir pertanyaan dengan skor total, sehingga sering disebut inter item total correlation. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui validitas masing-masing butir pertanyaan. Butir pertanyaan dapat dikatakan valid atau sah jika  $r$  hitung  $>$  daripada  $r$  tabel. Butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan tidak valid jika  $r$  hitung  $\leq$  daripada  $r$  tabel.

b. Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar suatu pengukuran mengukur dengan stabil atau konsisten (Ghozali, 2011). Instrumen dipercaya jika jawaban dari responden atas pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji ini dilakukan dengan menggunakan koefisien *crobach alpha* dengan bantuan program SPSS 22. Cara untuk mengukur reliabilitas dengan *Cronbach's Alpha* dengan kriteria lebih dari 0,6 adalah reliabel (Ghozali, 2011).

**2. Pengujian Asumsi Klasik**

Suatu model regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi asumsi klasik yaitu asumsi normalitas dan asumsi heteroskedastisitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian asumsi

normalitas dan asumsi heteroskedastisitas sebelum dilakukan pengujian hipotesis (Ghozali, 2011:140). Berikut penjelasan uji klasik yang akan dilakukan di penelitian ini :

a. Uji Asumsi Normalitas

Menurut Ghozali (2011) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov test* dengan taraf signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan nilai  $Sig > 0,05$  maka dikatakan berdistribusi normal. Jika nilai  $Sig < 0,05$  maka dikatakan berdistribusi tidak normal.

b. Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018:137) Uji Heterokedastitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan data crossection mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar).

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ( $Y$  prediksi -  $Y$  sesungguhnya) telah di studentized. Dasar analisisnya sebagai berikut :

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### d. Uji Multikolinieritas

Ghozali (2018: 107) menyebutkan bahwa uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang bagus sebaiknya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Apabila variabel independen ini saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel

ortogonal merupakan variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menjelaskan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Di dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Maka nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF=1/Tolerance$ ). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai  $VIF > 10$ .

Berdasarkan aturan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance* dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai VIF lebih dari angka 10 atau nilai *tolerance* kurang dari 0.10 maka dikatakan terjadi gejala multikolinearitas.
2. Jika nilai VIF kurang dari angka 10 atau nilai *tolerance* kurang dari 0.10 maka dikatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas (Ghozali, 2018:108).



### 3. Analisis Regresi Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik yakni analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh penggunaan kompetensi (X1), sistem pengendalian internal (X2) dan peran perangkat desa (X3) terhadap akuntabilitas pemerintah desa (Y). Rumus regresi yang digunakan adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

$a$	= Konstanta
$X_1$	= Kompetensi
$X_2$	= Sistem Pengendalian Internal
$X_3$	= Peran Perangkat Desa
$Y$	= Akuntabilitas Pemerintaah Desa
$b_1, b_2, b_3$	= Koefisien regresi untuk $X_1, X_2, X_3$
$e$	= <i>error term</i>

### 4. Pengujian Hipotesis

#### a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t (Uji Parsial), yaitu untuk menguji apakah variabel independen, secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Adapun kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Nilai signifikan  $< 0,05$  maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
  2. Nilai signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2018: 97) koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtut waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Kramat**

##### **1. Keadaan Geografis**

Kecamatan Kramat terletak pada posisi antara 109<sup>o</sup> 15'52" BT - 109<sup>o</sup> 23'00" BT dan antara 6<sup>o</sup> 85'98" LS – 6<sup>o</sup> 90'47" LS, memiliki wilayah yang terdiri dari daratan pesisir, dengan kemiringan datar. Luas Kecamatan Kramat adalah 3.849 hektar terdiri dari 53,34 % merupakan lahan sawah yaitu seluas 2.053 hektar, sementara lahan kering dan lahan pertanian bukan sawah seluas 1.796 hektar. Dari Luas lahan sawah tersebut seluruhnya merupakan lahan sawah berpengairan teknis. Sedangkan lahan bukan pertanian terdiri dari 1.186 hektar merupakan bangunan dan pekarangan, dan 131 hektar merupakan lahan tegal dan kebun. Dan sebagai kawasan pesisir pantai utara Jawa Tengah, kecamatan Kramat memiliki lahan tambak seluas 206 hektar. Dan lahan lainnya digunakan untuk kawasan lain, seperti makam, lapangan, jalan, dan sebagainya.

Desa-desa yang berbatasan dengan pantai utara laut Jawa adalah desa Maribaya, Kramat, Bongkok, Munjung Agung, Padaharja dan kelurahan Dampyak. Sedangkan batas-batas Kecamatan Kramat sbb :

Sebelah utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kecamatan Suradadi

Sebelah Selatan : Kecamatan Talang dan Kecamatan Tarub

Sebelah Barat : Kota Tegal

## 2. Keadaan Iklim

Curah hujan selama tahun 2018 sebanyak 1.368,4 mm dengan hari hujan sebanyak 89 sepanjang tahun 2018 atau dapat disebut bahwa setahun terakhir lebih kering dari tahun 2017 yang bisa mencapai 98 hari. Sedangkan kelembaban udara tahun 2018 sekitar 68 - 86 %. Sebagai kawasan perkotaan pesisir Kecamatan Kramat mengalami dampak pemanasan global dengan suhu udara berkisar 25 - 32 derajat celcius. Wilayah Kecamatan Kramat berada 16 km di sebelah utara ibukota Kabupaten Tegal. Merupakan dataran pesisir dengan ketinggian 1 - 11 m di atas permukaan laut.

## 3. Pemerintahan

Terdapat sebanyak 20 Pemerintahan Desa di Kecamatan Kramat. Terdiri dari 19 yang berstatus desa, sedangkan Dampyak adalah satusatunya wilayah yang berstatus kelurahan. Sebagian besar desa di Kecamatan Kramat dipimpin oleh generasi muda, hal ini tergambar dari rata-rata usia Kepala Desa yang berumur 44 tahun. Dengan pendidikan Kepala Desa sebagian besar adalah lulusan SLTA. Sumber Daya Manusia yang mengelola Pemerintahan Desa sudah cukup memadai 80% aparat Desa adalah lulusan SLTA ke atas, hal ini menunjukkan kenaikan kualitas pendidikan aparat desa dibandingkan kondisi tahun sebelumnya dan cenderung bertambah setiap tahunnya. Semakin bertambahnya aparat desa

dengan tingkat pendidikan diploma dan sarjana, diharapkan dapat meningkatkan sumberdaya manusia di desa yang akan berujung pada perbaikan kinerja aparatur desa. Di Kecamatan Kramat terdapat 504 RT (rukun tetangga) dan 95 RW atau rukun warga serta terbagi dalam 51 pedukuhan. Desa Mejasem Barat adalah wilayah desa dengan jumlah RT terbanyak dengan 121 rukun tetangga dan 19 RW.

#### 4. Kependudukan

Jumlah penduduk di Kecamatan Kramat pada 2018 terdapat 112.805 jiwa, terdiri dari 55.826 laki-laki dan 56.978 penduduk perempuan. Desa Mejasem Barat tercatat memiliki penduduk terbanyak dengan 16.068 jiwa, sedangkan Desa Ketileng ada sejumlah 2.478 jiwa penduduk dan merupakan desa dengan penduduk paling sedikit di Kecamatan Kramat. Komposisi Penduduk produktif dengan usia 15-64 tahun, sebanyak 75.564 jiwa atau 66,99 % sedangkan penduduk dengan usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas masing-masing 31.953 jiwa dan 5.288 jiwa. Kepadatan penduduk di Kecamatan Kramat adalah sebesar 2.931 jiwa per km<sup>2</sup> . Desa Mejasem Barat merupakan desa terpadat penduduknya dengan 12.456 jiwa per km<sup>2</sup> , disusul Desa Kemantran dengan 6.673 jiwa per km<sup>2</sup> . Sedangkan Desa Plumbungan memiliki kepadatan penduduk terkecil dengan 1.645 jiwa per km<sup>2</sup> .

Sebagai kawasan pantura, penduduk Kecamatan Kramat sebagian besar masih bekerja di sektor perdagangan dan pertanian tanaman pangan. Kedua lapangan pekerjaan tersebut masing-masing menyerap 19,69% dan

14,68%. Hal yang menjadi khusus di Kecamatan Kramat adalah terdapat 10.09% penduduk yang bekerja di sub-sektor perikanan, karena kawasan Kecamatan Kramat berada di pesisir Laut Jawa. Sedangkan sektor industri menyerap 14.20% tenaga kerja hal ini dikarenakan di kecamatan ini terdapat kawasan Industri Besar khususnya di jalur pantura.

Kegiatan ekonomi di Kecamatan Kramat merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal. Usaha Industri Besar Sedang tercatat 21 unit tahun 2018 dengan tenaga kerja mencapai 4.447 orang. Sedangkan keberadaan usaha kecil dan mikro Kelompok Industri Logam Mesin dan Elektronika (ILME) tahun 2018, kondisinya masih tetap seperti tahun sebelumnya yaitu sebanyak 12 unit dengan tenaga kerja 256 orang, Kegiatan usaha ini terkonsentrasi di Kelurahan Dampyak, karena di wilayah ini terdapat kompleks LIK (Lingkungan Industri Kecil). Kelompok Industri Produk Tekstil sebanyak 1 unit industri besar, 1 unit industri sedang dan 4 unit industri kecil dengan tenaga kerja 427 orang dan terkonsentrasi di desa Dampyak, Padaharja, dan Jatilawang

## 5. Pendidikan

Fasilitas pendidikan di kecamatan Kramat relatif lengkap. Sejumlah sekolah dan madrasah berdiri tersebar di wilayah kecamatan. Selain pendidikan negeri, di kecamatan ini juga terdapat sejumlah pendidikan yang dikelola oleh pihak swasta.

Secara ringkas dapat disebutkan bahwa jumlah sekolah Taman Kanak Kanak adalah 33 unit, sedangkan sekolah dasar terdapat 42 unit SD negeri

dan 4 SD swasta. Untuk tingkat sekolah menengah masing-masing SMP negeri 2 unit, SMP swasta 4 unit, SMA negeri 1 unit dan SMK swasta 3 unit. Sementara untuk tingkat sekolah tinggi tidak terdapat di kecamatan Kramat.

Jumlah Peserta Didik TK tercatat 1.917, sedangkan siswa SD Negeri 9.062 dan SD swasta 681 siswa, adapun siswa SMP Negeri sebanyak 1.745 dan SMP swasta 601 siswa. Sementara untuk siswa SMA Negeri sebanyak 1.007 siswa dan SMK swasta 2.089 siswa. Jumlah madrasah Raudhatul Athfal atau RA adalah 10 unit dengan jumlah siswa tercatat 788, sedangkan untuk MI terdapat 8 unit MIswasta dengan jumlah anggota belajar sebanyak 1.756. Untuk tingkat sekolah menengah masing-masing MTs swasta 1 unit dengan 473 siswa

## **B. Hasil Penelitian**

Penelitian ini menguji sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

### **1. Deskripsi Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1  
Deskripsi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
<b>Laki-laki</b>	28	93%
<b>Wanita</b>	2	7 %
<b>Jumlah</b>	30	100%

Sumber: Data diolah, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang merupakan kepala desa, sekretaris desa dan bendahara di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 28 responden (93%), dan yang berjenis kelamin wanita sebanyak 2 responden (7 %).

Identitas responden berdasarkan Umur pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2.  
Deskripsi Responden berdasarkan Umur

<b>Umur</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
<b>21 - 30 Tahun</b>	1	3 %
<b>31 – 40 Tahun</b>	27	90 %
<b>41 - 50 Tahun</b>	1	3 %
<b>Di atas 51 Tahun</b>	1	3 %
<b>Jumlah</b>	30	100%

Sumber: Data diolah, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang merupakan kepala desa, sekretaris desa dan bendahara di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal yang berusia antara 21 - 30 tahun sebanyak 1 responden atau 3%, yang berusia antara 31 - 40 tahun sebanyak 27 responden (90%)



yang berusia antara 41-50 tahun sebanyak 1 responden (3 %) dan yang berusia di atas 51 tahun yaitu sebanyak 1 responden (3%).

Identitas responden berdasarkan pendidikan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3.  
Deskripsi Responden berdasarkan Pendidikan

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
<b>SMA / Sederajat</b>	26	87 %
<b>D3</b>	3	10 %
<b>S1</b>	1	4 %
<b>S2</b>	0	0 %
<b>Jumlah</b>	30	100%

Sumber: Data diolah, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang merupakan kepala desa, sekretaris desa dan bendahara di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal yang memiliki pendidikan terendah SMA/ sederajat sebanyak 26 responden atau 87%, yang memiliki pendidikan terendah D3 sebanyak 3 responden atau 10%, yang memiliki pendidikan terendah S1 sebanyak 1 responden atau 4% dan tidak ada satu responden pun yang memiliki pendidikan S2.

## 2. Pengujian Validitas

Validitas dapat diterjemahkan dengan sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Suatu tes atau instrumen

pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Validitas setiap item pertanyaan ditunjukkan dengan nilai koefisien validitas. Oleh karena itu, untuk mendapatkan instrumen yang valid peneliti menggunakan metode pengujian validitas isi (*content validity*) dengan analisis item, yaitu dengan mengkorelasikan antara skor butir instrument dengan skor total. Untuk menghitung korelasi pada uji validitas menggunakan korelasi *Product Moment Pearson*. Butir pernyataan dikatakan tidak valid jika  $r_{hitung} \leq r_{tabel}$  daripada  $r_{tabel}$ .

Tabel 4.4  
Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

No.	Keterangan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Kriteria
<b>Sistem Informasi Akuntansi</b>				
1	Pernyataan Nomor 1	0,925	0,361	Valid
2	Pernyataan Nomor 2	0,925	0,361	Valid
3	Pernyataan Nomor 3	0,925	0,361	Valid
4	Pernyataan Nomor 4	0,925	0,361	Valid
<b>Sistem pengendalian Internal</b>				
1	Pernyataan Nomor 1	0,653	0,361	Valid
2	Pernyataan Nomor 2	0,543	0,361	Valid
3	Pernyataan Nomor 3	0,704	0,361	Valid
4	Pernyataan Nomor 4	0,863	0,361	Valid
5	Pernyataan Nomor 5	0,759	0,361	Valid
6	Pernyataan Nomor 6	0,571	0,361	Valid
7	Pernyataan Nomor 7	0,710	0,361	Valid
8	Pernyataan Nomor 8	0,765	0,361	Valid
9	Pernyataan Nomor 9	0,725	0,361	Valid
10	Pernyataan Nomor 10	0,725	0,361	Valid
<b>Teknologi Informasi</b>				

No.	Keterangan	rhitung	rtabel	Kriteria
1	Pernyataan Nomor 1	0,361	0,361	Valid
2	Pernyataan Nomor 2	0,361	0,361	Valid
3	Pernyataan Nomor 3	0,361	0,361	Valid
4	Pernyataan Nomor 4	0,361	0,361	Valid
<b>Akuntabilitas</b>				
1	Pernyataan Nomor 1	0,573	0,361	Valid
2	Pernyataan Nomor 2	0,549	0,361	Valid
3	Pernyataan Nomor 3	0,801	0,361	Valid
4	Pernyataan Nomor 4	0,625	0,361	Valid
5	Pernyataan Nomor 5	0,745	0,361	Valid
6	Pernyataan Nomor 6	0,587	0,361	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2020

Dari hasil pengujian validitas variabel penelitian di atas dapat diketahui bahwa semua butir pernyataan dalam kuesioner adalah valid karena mempunyai  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel} (n=30) = 0,361$ . Maka dapat diambil kesimpulan, bahwa seluruh keseluruhan butir pernyataan variabel yang digunakan dalam penelitian ini layak digunakan dalam penelitian dan dinyatakan valid.

### 3. Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana tingkat konsistensi pengukuran dari suatu responden ke responden yang lain atau dengan kata lain sejauh mana pertanyaan dapat dipahami sehingga tidak menyebabkan beda interpretasi dalam pemahaman pertanyaan tersebut. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, penulis menggunakan koefisien *cronbach's alpha* ( $\alpha$ ). Pengujian realibilitas dengan konsistensi internal dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data

yang diperoleh dianalisis butir-butir pertanyaan dalam penelitian ini digunakan tehnik *Cronbach's Alfa* (koefisien alfa). Suatu item pengukuran dapat dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien alfa lebih besar dari 0,6.

Tabel 4.5  
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Sistem Informasi Akuntansi	0,944	0,6	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0,856	0,6	Reliabel
Pemanfaatan teknologi Informasi	0,715	0,6	Reliabel
Akuntabilitas Pemerintah Desa	0,636	0,6	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2020

Hasil pengujian reliabilitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai *cronbach alpha* yang cukup besar yaitu di atas 0,6 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur variabel penelitian.

#### 4. Pengujian Asumsi Klasik

Suatu model regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi asumsi klasik yaitu, asumsi *normalitas* dan *heterokedastisitas*. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian *normalitas* dan *heterokedastisitas* sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Berikut penjelasan uji asumsi klasik yang akan dilakukan penelitian ini (Ghozali, 2018).

a. Uji Normalitas

Ghozali (2011) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov test* dengan taraf signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan nilai Sig > 0,05 maka dikatakan berdistribusi normal. Jika nilai Sig < 0,05 maka dikatakan berdistribusi tidak normal..

Tabel 4.6  
Hasil Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,32231118
Most Extreme Differences	Absolute	,210
	Positive	,156
	Negative	-,210
Kolmogorov-Smirnov Z		1,153
Asymp. Sig. (2-tailed)		,140

a. Test distribution is Normal.

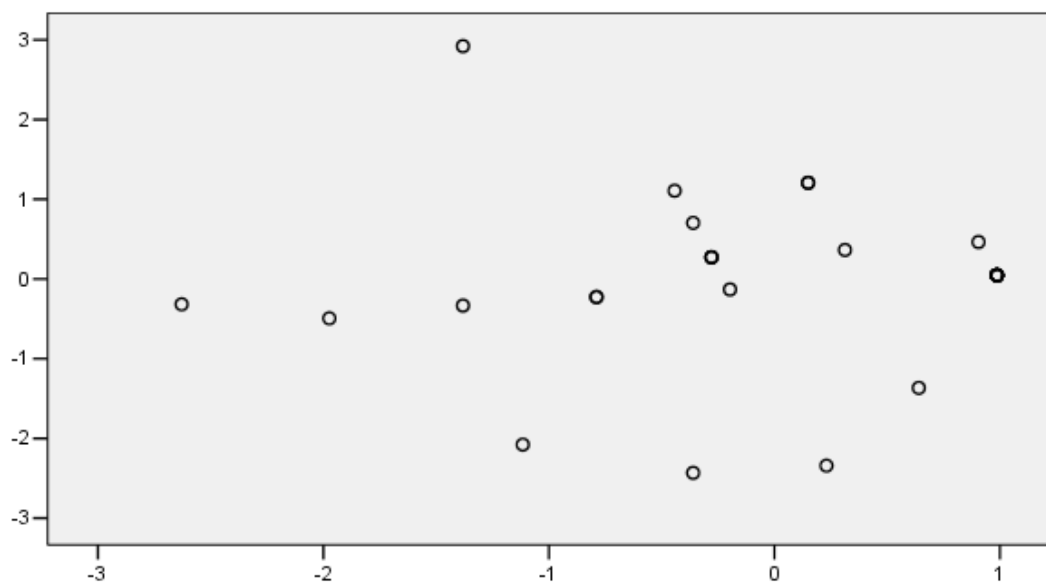
b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh probabilitas *asympt.sig* pada *unstandardized residual* sebesar 0,140 yang lebih besar dari 0,05. Sehingga menunjukkan bahwa distribusi data dalam penelitian ini normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang Heteroskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Dasar analisis ada tidaknya masalah heterokedastisitas adalah jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).



Gambar 4.1  
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik scatterplot menunjukkan bahwa tidak ditemukan pola tertentu yang teratur dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi

#### c. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dirancang untuk menentukan apakah ada korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam model regresi linier berganda. Jika ada korelasi yang tinggi antara variabel

independen hubungan antara variabel independen dan variabel dependen terganggu.

Tabel 4.7  
Hasil Uji Multikollinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Sistem Informasi Akuntansi	,115	8,731
	Sistem Pengendalian internal	,198	5,055
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	,192	8,836

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Dari hasil perhitungan uji asumsi klasik pada bagian *collinearity statistic* terlihat untuk ketiga variabel independen, angka VIF yaitu untuk variabel system informasi akuntansi sebesar 8,731; untuk variabel system pengendalian internal sebesar 5,055; dan untuk variabel pemanfaatan taknologi informasi sebesar 8,836 yang lebih kecil dari 10 sehingga tidak melebihi batas nilai VIF yang diperkenankan yaitu maksimal sebesar 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas

## 5. Analisis Regresi Berganda

Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 4.8  
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,540	1,564		4,182	,000
	Sistem Informasi Akuntansi	,268	,106	,282	2,525	,018
	Sistem Pengendalian internal	,134	,059	,193	2,269	,032
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	,568	,133	,534	4,286	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi ganda dengan menggunakan program SPSS diperoleh persamaan regresi yaitu  $\hat{Y} = 6,540 + 0,268 X_1 + 0,134 X_2 + 0,568 X_3$ . Berdasarkan persamaan regresi berganda di atas dapat diambil suatu analisis bahwa:

- a. Konstanta sebesar 6,540 artinya jika tidak ada variabel sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi maka akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa adalah sebesar 6,540 satuan.
- b. Koefisien regresi untuk variabel sistem informasi akuntansi sebesar 0,268 dan bertanda positif artinya jika variabel sistem informasi akuntansi ditingkatkan sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan peningkatan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa sebesar 26,80%.
- c. Koefisien regresi untuk variabel sistem pengendalian internal sebesar 0,134 dan bertanda positif artinya jika variabel sistem pengendalian internal ditingkatkan sedangkan variabel lain tetap, maka akan



menyebabkan peningkatan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa sebesar 13,4%.

- d. Koefisien regresi untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,568 dan bertanda positif artinya jika variabel pemanfaatan teknologi informasi ditingkatkan sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan peningkatan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa sebesar 56,8%.

## 6. Pengujian Parsial

Pengujian parsial atau uji Ketepatan Parameter Penduga (*Estimate*). Digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji parsial digunakan untuk menguji apakah jawaban pertanyaan hipotesis itu benar. Uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel terikat.

Tabel 4.9  
Hasil Pengujian Parsial

### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,540	1,564		4,182	,000
Sistem Informasi Akuntansi	,268	,106	,282	2,525	,018
Sistem Pengendalian internal	,134	,059	,193	2,269	,032
Pemanfaatan Teknologi Informasi	,568	,133	,534	4,286	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Berdasarkan hasil pengujian parsial pada tabel di atas dapat diartikan bahwa :

- a. Dari pengujian hipotesis secara parsial Sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa diperoleh nilai  $\text{sig} = 0,018 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu “Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa” dapat diterima kebenarannya.
- b. Dari pengujian hipotesis secara parsial Sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa diperoleh nilai  $\text{sig} = 0,032 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yaitu “Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa” dapat diterima kebenarannya.
- c. Dari pengujian hipotesis secara parsial pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa diperoleh nilai  $\text{sig} = 0,000 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yaitu “pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa” dapat diterima kebenarannya.

## 7. Koefisien Determinasi

Untuk menguji model penelitian ini adalah dengan menghitung koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu Ghozali (2011) Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti  $R^2$ , nilai *adjusted R<sup>2</sup>* dapat naik turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2018).

Tabel 4.10  
Hasil Analisis Koefisien Determinasi

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,981 <sup>a</sup>	,963	,958	,34040

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian internal, Sistem Informasi Akuntansi

Besarnya pengaruh dari sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama-sama terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa adalah sebesar 95,8 % dan selebihnya yaitu sebesar 4,2 % dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti.

## C. Pembahasan

### 1. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa.

Dari pengujian hipotesis secara parsial Sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa diperoleh nilai  $\text{sig} = 0,018 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu “Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa” dapat diterima kebenarannya.

Dalam hal pengurusan dan pengelolaan dana desa, SIA sangat perlu dilakukan karena akan menentukan bagaimana pengelolaan serta penggunaan dana desa dengan baik. Dalam hal ini, SIA dapat diartikan sebagai catatan dan laporan koordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan desa yang dibutuhkan oleh pemerintah desa guna memudahkan pengelolaan dana desa yang ada. Ratih (2016) menyatakan bahwa rancang bangun dan pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah menjadikan sebuah proses menjadi mudah dan cepat serta kemampuan penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja SKPD.

Sudana (2015) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem aplikasi terkomputerisasi yang mampu melakukan pengolahan data transaksi keuangan perusahaan secara terintegrasi. Rusmayanti *et al.* (2016) menyatakan bahwa adanya sistem

pengelolaan keuangan di Desa, Kaur Keuangan menjadi lebih terbantu. Penyimpanan data pengelolaan keuangan tidak membutuhkan berkas banyak dan data bisa digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama. Sistem Informasi Akuntansi pada pengelolaan dana desa akan memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap ketidakstabilan pengelolaan dana desa yang ada serta Sistem Informasi Akuntansi yang baik akan berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dana desa yang ada di desa tersebut.

## 2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa.

Dari pengujian hipotesis secara parsial Sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa diperoleh nilai  $\text{sig} = 0,032 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yaitu “Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa” dapat diterima kebenarannya

Pengendalian internal yang efektif dapat meningkatkan praktek tata kelola yang baik dan menurunkan korupsi di Ghana (Mensah, *et al.*, 2015). Al-Zwyalif (2015) juga mengemukakan hal yang senada bahwa pengendalian internal memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan pilar *corporate governance* pada perusahaan asuransi di Yordania dan keberhasilan *corporate governance* membutuhkan kepatuhan terhadap seluruh unsur pengendalian internal. Sedangkan

menurut Mehaela dan Iulian (2015) menyatakan bahwa *corporate governance* dan pengendalian internal tidak boleh dilihat secara terpisah. Sebuah organisasi tanpa sebuah cara pandang pemimpin jangka panjang yang efisien, mekanisme pengendalian internal yang efektif tidak akan dapat bertahan. Oleh karena itu *corporate governance* tidak akan berjalan efektif tanpa pengendalian internal yang baik.

Inspektorat daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP pada bagian kedua mengenai Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Inspektorat daerah merupakan pengawas internal (internal auditor) dalam pemerintah daerah. Sebagai pengawas internal, keberadaan inspektorat daerah dinilai sangat penting dilihat juga dari fungsi dasarnya yaitu melakukan pengawasan pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pengawasan pemerintah meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui evaluasi dan perbaikan pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola pemerintahan (Aikins 2016).

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendefinisikan Sistem Pengendalian Internal pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang

memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan Aparat Pegawai Instansi Pemerintah sebagai salah satu sarana pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa SPIP memiliki peran penting dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Teori agensi pihak *principal* adalah pihak yang memberi mandat kepada pihak lain yaitu *agents* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Penyimpangan dan kebocoran masih banyak ditemukan di dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal dibutuhkan untuk meminimalkan adanya kecurangan dalam suatu sistem. Sistem Pengendalian Internal dapat memberi keyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal maka dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Semakin baik Sistem Pengendalian Internal maka semakin baik Akutabilitas pengelolaan Dana Desa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyatama, et al (2017) dan Yudiantoro (2017) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian

Internal Aparatur dari Pemerintah Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

### 3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa.

Dari pengujian hipotesis secara parsial pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa diperoleh nilai  $\text{sig} = 0,000 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yaitu “pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa” dapat diterima kebenarannya.

Teknologi informasi digunakan oleh sebuah organisasi untuk pemrosesan, dan penyimpanan informasi, serta berfungsi sebagai penyebaran informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meringankan dan membantu tugas yang dilakukan seperti halnya penyusunan laporan keuangan. (Rahadi, 2017) menyatakan bahwa Teknologi Informasi mempunyai manfaat atau kemudahan bagi seseorang dalam menghemat waktu maupun tenaga. Begitupula pada tingkat pemerintahan desa, pemanfaatan teknologi digunakan oleh aparat desa dalam mengelola data dan menyimpan informasi. Teknologi informasi ini juga dapat digunakan sebagai media meminimalisir kesalahan yang terjadi, baik yang disengaja ataupun yang disengaja.

Berdasarkan *Stewardship theory*, *principals* yaitu pemerintah berhak meminta pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa



dari Pemerintahan Desa. Oleh karena itu Pemerintah Desa memiliki kewajiban membuat laporan sesuai dengan peraturan serta tidak mengandung unsur yang membingungkan bagi para pemakai laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah desa nantinya akan diberikan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi menjadikan laporan keuangan disusun secara lebih andal dan relevan. Teknologi informasi mempermudah integrasi pelaporan dari Pemerintah Desa (*steward*) ke Pemerintah (*principals*). Dengan demikian pemanfaatan teknologi informasi akan meminimalisir keterlambatan pelaporan kinerja pengelolaan dana desa.

Penelitian Sugiarti & Yudianto (2017), Jannah, dkk (2018) dan Sapartiningsih, dkk (2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemanfaatan teknologi informasi menjadikan informasi yang didapat semakin relevan dan pendistribusian informasi lebih efektif. Sehingga dengan demikian akan meminimalisir kecurangan dalam pengalokasian dana desa

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Penelitian ini membuktikan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa, artinya semakin baik penerapan sistem informasi akuntansi maka akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana juga akan semakin baik.
2. Penelitian ini membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa, artinya semakin baik sistem pengendalian internal maka akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana juga akan semakin baik.
3. Penelitian ini membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa, artinya semakin baik sistem pengendalian internal maka akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana juga akan semakin baik.

## **B. Saran**

Dari hasil analisis yang telah dikemukakan, maka saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Aparatur desa di kecamatan Kramat sebaiknya meningkatkan pemahaman tentang sistem informasi akuntansi sehingga dalam pengelolaan dana desa dapat lebih baik dengan cara mengikuti pelatihan atau diklat tentang penerapan sistem informasi akuntansi.
2. Pemerintah daerah khususnya kecamatan Kramat sebaiknya meningkatkan penerapan sistem pengendalian internal dengan cara dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggungjawaban/SPJ).
3. Pemerintah daerah khususnya kecamatan Kramat sebaiknya meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan teknologi informasi.
4. Pemerintah daerah khususnya kecamatan Kramat sebaiknya meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. Pelatihan bagi aparatur Desa selaku Tim Pelaksana Desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan ADD.
5. Penelitian terdahulu yang akan meneliti tentang akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa sebaiknya menambah variabel yang diteliti misalnya kompetensi aparatur serta menambah jumlah sampel.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karna penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain :

1. Jumlah responden yang hanya 30 orang, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya
2. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aksi-Corruption Forum (IACF) tahun 2010.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, Y. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Survei pada Dinas Kota Bandung). Elib. Unikom.
- Bastian, I. (2015). *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Diarespati. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*. Vol. 2 No. 2 Tahun 2017.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM. SPSS 19 (edisi kelima)*. Semarang: BP. UNDIP.
- Shelvi Rezeki, Iwin Arnova (2019). Sistem Informasi Akuntansi Alokasi Dana Desa Di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Akuntansi Unihaz –JAZ*. Vol.2 No.2. Tahun 2019.
- Hudayana, B dan Tim Peneliti FPPD. (2005). *Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat Melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa : Pengalaman Enam Kabupaten*. Makalah Pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat FPPM di Lombok Barat 27-29 Januari 2005.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Study Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Assets. Jurnal Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak* Volume 1 No 2 – Juli 2017
- Iyoha, F. O dan D. Oyerinde. (2009). Accounting Infrastructure And Accountability in The Management of Public Expenditure in Developing Countries : A Focus on Nigeria. *Critical Perspectives on Accounting*, 21 : 361-373.

- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAN BPKP RI, Jakarta.
- Mulyadi. (2009). *Auditing*. Yogyakarta: STIE YPKPN.
- Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sagala, R. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Davis Budi Purnama, Hendy Widiastoeti. (2015). Audit Internal Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Menilai Akuntabilitas Kinerja Desa (Di Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*. Vol 9, No 1 (2019).
- Sudarmayanti. (2010). *Managemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Managemen Pegawai Negeri Sipil (cetakan kelima)*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2010). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Yuliansyah. (2017). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rias Sukma Larasati, Agus Edro Suwarno. (2019). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi Dan Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris pada desa di Kecamatan Mantingan Ngawi tahun 2019). *Seminar Nasional UNIBA Surakarta 2020*. ISBN. 978-979-1230-65-0.

Dwi Sapartiningsih, Suharno, Djoko Kristianto. (2019). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* Vol. 14 100 No. 1 Maret 2018

## **LAMPIRAN**



## Lampiran 1

## Kuesioner Penelitian

“Pengaruh Sistem Informasi, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal”

Bapak, Ibu atau Saudara/i yang terhormat, bersamaan dengan ini saya mohon kesediaan Bapak, Ibu atau Saudara/i untuk mengisi data kuesioner mengenai Pengaruh Sistem Informasi, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Informasi yang Bapak, Ibu atau Saudara/i berikan merupakan bantuan yang sangat berharga dalam proses menyelesaikan penyusunan skripsi saya.

Oleh karena itu kepada Bapak, Ibu atau Saudara/i, saya sebagai peneliti mengharapkan :

1. Bapak, Ibu atau Saudara/i menjawab setiap pertanyaan dengan sejujur-jujurnya, dan perlu diketahui bahwa jawaban Bapak, Ibu atau Saudara/i tidak berhubungan dengan benar atau salah.
2. Pilihlah jawaban dengan memberi tanda *check* (✓) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak, Ibu atau Saudara/i yaitu:
  - a. SS : Sangat Setuju
  - b. S : Setuju
  - c. KS : Kurang Setuju

- d. TS : Tidak Setuju  
e. STS : Sangat Tidak Setuju

### **Identitas Pribadi Responden**

Lingkari pada pilihan jawaban yang paling sesuai menurut Bapak, Ibu atau Saudara/i.

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Wanita
- c. Umur : 1. 21 – 30 tahun  
2. 31 – 40 tahun  
3. 41 – 50 tahun  
4. diatas 51 tahun
- d. Pendidikan : 1. SMA/Sederajat  
2. D3  
3. S1  
4. S2

### A. Pernyataan Mengenai Sistem Informasi Akuntansi

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Bapak, Ibu atau saudara/i yakin akan kemampuan diri sendiri dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.					
2	Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan					
3	Desa bertugas mencatat setiap adanya penerimaan dan pengeluaran kas.					
4	Bendahara desa mendapatkan laporan penerimaan dan pengeluaran kas dan membuat laporannya dalam jangka waktu bulanan.					

Sumber : Sudarmanto (2016)

### B. Pernyataan Mengenai Sistem Pengendalian Internal

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	kepala desa selalu melakukan riview kinerja yang dibandingkan dengan tolak ukur kinerja					
2	BPD selalu mengawasi pelaksanaan kegiatan desa.					
3	Istansi tempat Bapak, Ibu atau Saudara/I bekerja memiliki pemisahaan fungsi pencatatan					
4	Istansi tempat Bapak, Ibu atau Saudara/I bekerja melakukan stock opname atau investasi berkala.					
5	Bendahara selalu melakukan riview sistem dengan pencatatan manual secara rutin.					
6	Pemerintah desa dan BPD harus mengetahui peraturan pelaksanaan anggaran dana desa.					
7	Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.					
8	Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara kompetensi.					
9	Istansi tempat Bapa, ibu atau Saudara/I bekerja memiliki penilaian aktivitas dalam bekerja					
10	Fungsi internal audit di instansi tempat Bapa, Ibu atau Saudara/i bekerja dengan baik.					

Sumber : Arens (2016)

### C. Pernyataan Mengenai Teknologi Informasi

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Komputer yang saudara gunakan dapat membantu anda untuk menyimpan data atau informasi yang anda miliki					
2	Kecepatan internet dapat mempengaruhi kecepatan dalam menjalankan sistem.					
3	Sistem yang saudara pake sudah sempurna.					
4	Pemerintah desa sudah menjalankan sistem aplikasi dengan baik					

Sumber : Sutrawati (2016)

### D. Pernyataan Mengenai Akuntabilitas

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Raperdes APBDesa disampekan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut					
2	Pemerintah desa membuat pengumuman penggunaan APBDes kepada masyarakat dengan cara menempel poster atau sepanduk					
3	Laporan keuangan desa di publikasikan secara terbuka melalui media masa					
4	Laporan keuangan desa diperiksa oleh ispektorat dan pemdes					
5	Instansi tempat Bapak/Ibu bekerja melakukan pencatatan di setiap kegiatan					
6	Instansi tempat Bapak/Ibu bekerja menyusun laporan pertanggungjawaban secara transparan					

Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014

## Lampiran 2

## Data Penelitian Variabel Sistem Informasi Akuntansi

No. Resp.	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Jabatan	Sisten Informasi Akuntansi				
					1	2	3	4	Jml
1	1	2	1	3	5	5	5	5	20
2	1	2	1	3	5	5	5	5	20
3	1	2	1	3	5	5	5	5	20
4	1	2	1	3	4	4	4	4	16
5	1	2	1	3	5	5	5	5	20
6	1	2	1	3	4	4	4	4	16
7	1	2	1	3	5	5	5	5	20
8	1	2	1	3	5	5	5	5	20
9	1	1	2	3	4	4	4	4	16
10	1	2	2	3	5	5	5	5	20
11	1	2	1	1	5	5	5	5	20
12	1	2	1	1	5	5	5	5	20
13	1	2	1	1	5	5	5	5	20
14	1	4	1	1	5	5	5	5	20
15	1	3	1	1	5	5	5	5	20
16	1	2	2	1	5	5	5	5	20
17	1	2	1	1	5	5	5	5	20
18	1	2	1	1	5	5	5	5	20
19	1	2	1	1	5	5	5	5	20
20	1	2	1	1	5	5	5	5	20
21	1	2	1	2	5	5	5	5	20
22	1	2	1	2	5	5	5	5	20
23	1	2	1	2	5	5	5	5	20
24	2	2	1	2	4	4	5	5	18
25	1	2	1	2	5	5	5	5	20
26	1	2	1	2	5	5	5	5	20
27	1	2	1	2	5	5	5	5	20
28	1	2	1	2	5	5	4	4	18
29	1	2	1	2	5	5	5	5	20
30	2	2	3	2	5	5	5	5	20



## Lampiran 4

## Data Penelitian Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

No. Resp.	Teknologi Informasi				Jml
	1	2	3	4	
1	4	4	4	4	16
2	5	5	5	5	20
3	4	4	4	4	16
4	5	5	4	4	18
5	5	5	5	5	20
6	5	5	5	5	20
7	5	5	5	5	20
8	5	5	5	5	20
9	5	5	4	4	18
10	5	5	4	5	19
11	5	5	5	5	20
12	5	5	5	5	20
13	5	5	5	5	20
14	5	5	5	5	20
15	5	5	5	5	20
16	5	5	5	5	20
17	5	5	5	5	20
18	5	5	5	5	20
19	5	5	5	5	20
20	5	5	5	5	20
21	5	5	5	5	20
22	5	5	5	5	20
23	5	4	5	5	19
24	4	4	4	5	17
25	5	5	5	5	20
26	4	5	5	5	19
27	5	4	5	5	19
28	5	5	4	5	19
29	5	5	5	5	20
30	5	5	3	5	18



## Lampiran 5

Data Penelitian Variabel Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola  
Alokasi Dana Desa

No. Resp.	Akuntabilitas						Jml
	1	2	3	4	5	6	
1	4	4	3	5	5	5	26
2	5	5	3	5	5	5	28
3	5	5	5	5	5	5	30
4	5	5	3	4	4	4	25
5	5	5	5	5	5	5	30
6	5	5	5	5	5	5	30
7	5	5	5	5	5	5	30
8	4	4	4	5	5	5	27
9	3	5	2	4	4	4	22
10	5	5	4	5	5	5	29
11	5	5	5	5	5	5	30
12	5	5	2	5	5	5	27
13	5	3	2	5	4	5	24
14	5	5	4	4	4	5	27
15	5	5	5	5	5	5	30
16	5	5	2	5	5	5	27
17	5	5	3	5	5	5	28
18	5	5	3	5	5	5	28
19	5	5	4	5	5	5	29
20	5	3	3	5	5	5	26
21	5	5	5	5	5	5	30
22	5	5	5	5	5	5	30
23	5	5	5	5	5	5	30
24	5	5	5	5	5	5	30
25	5	3	4	4	4	5	25
26	5	5	5	5	5	5	30
27	5	5	4	5	5	5	29
28	5	5	4	5	5	5	29
29	5	5	3	5	5	5	28
30	5	5	3	5	5	5	28

## Lampiran 6

## Hasil Pengujian Validitas

**Correlations****Correlations**

		SIA_1	SIA_2	SIA_3	SIA_4	SIA
SIA_1	Pearson Correlation	1	1,000**	,712**	,712**	,925**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30
SIA_2	Pearson Correlation	1,000**	1	,712**	,712**	,925**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30
SIA_3	Pearson Correlation	,712**	,712**	1	1,000**	,925**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	30	30	30	30	30
SIA_4	Pearson Correlation	,712**	,712**	1,000**	1	,925**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	30	30	30	30	30
SIA	Pearson Correlation	,925**	,925**	,925**	,925**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Reliability****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,944	4

## Correlations

Correlations

	SPI 1	SPI 2	SPI 3	SPI 4	SPI 5	SPI 6	SPI 7	SPI 8	SPI 9	SPI 10	SPI
SPI_1 Pearson Correlation	1	,331	,351	,402*	,423*	,012	,288	,523**	,850**	,850**	,653**
SPI_1 Sig. (2-tailed)		,074	,057	,027	,020	,951	,122	,003	,000	,000	,000
SPI_1 N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SPI_2 Pearson Correlation	,331	1	,104	,298	,331	,326	,575**	,039	,232	,232	,543**
SPI_2 Sig. (2-tailed)	,074		,585	,110	,074	,079	,001	,839	,216	,216	,002
SPI_2 N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SPI_3 Pearson Correlation	,351	,104	1	,734**	,351	,454*	,239	,745**	,447*	,447*	,704**
SPI_3 Sig. (2-tailed)	,057	,585		,000	,057	,012	,203	,000	,013	,013	,000
SPI_3 N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SPI_4 Pearson Correlation	,402*	,298	,734**	1	,704**	,428*	,686**	,684**	,513**	,513**	,863**
SPI_4 Sig. (2-tailed)	,027	,110	,000		,000	,018	,000	,000	,004	,004	,000
SPI_4 N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SPI_5 Pearson Correlation	,423*	,331	,351	,704**	1	,363*	,681**	,523**	,523**	,523**	,759**
SPI_5 Sig. (2-tailed)	,020	,074	,057	,000		,049	,000	,003	,003	,003	,000
SPI_5 N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SPI_6 Pearson Correlation	,012	,326	,454*	,428*	,363*	1	,367*	,457*	,060	,060	,571**
SPI_6 Sig. (2-tailed)	,951	,079	,012	,018	,049		,046	,011	,754	,754	,001
SPI_6 N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SPI_7 Pearson Correlation	,288	,575**	,239	,686**	,681**	,367*	1	,356	,356	,356	,710**
SPI_7 Sig. (2-tailed)	,122	,001	,203	,000	,000	,046		,053	,053	,053	,000
SPI_7 N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SPI_8 Pearson Correlation	,523**	,039	,745**	,684**	,523**	,457*	,356	1	,630**	,630**	,765**
SPI_8 Sig. (2-tailed)	,003	,839	,000	,000	,003	,011	,053		,000	,000	,000
SPI_8 N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SPI_9 Pearson Correlation	,850**	,232	,447*	,513**	,523**	,060	,356	,630**	1	1,000**	,725**
SPI_9 Sig. (2-tailed)	,000	,216	,013	,004	,003	,754	,053	,000		,000	,000
SPI_9 N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SPI_10 Pearson Correlation	,850**	,232	,447*	,513**	,523**	,060	,356	,630**	1,000**	1	,725**
SPI_10 Sig. (2-tailed)	,000	,216	,013	,004	,003	,754	,053	,000	,000		,000
SPI_10 N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SPI Pearson Correlation	,653**	,543**	,704**	,863**	,759**	,571**	,710**	,765**	,725**	,725**	1
SPI Sig. (2-tailed)	,000	,002	,000	,000	,000	,001	,000	,000	,000	,000	
SPI N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Reliability

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,856	10

## Correlations

Correlations

		TI_1	TI_2	TI_3	TI_4	TI
TI_1	Pearson Correlation	1	,614**	,336	,423*	,753**
	Sig. (2-tailed)		,000	,070	,020	,000
	N	30	30	30	30	30
TI_2	Pearson Correlation	,614**	1	,255	,351	,707**
	Sig. (2-tailed)	,000		,174	,057	,000
	N	30	30	30	30	30
TI_3	Pearson Correlation	,336	,255	1	,522**	,772**
	Sig. (2-tailed)	,070	,174		,003	,000
	N	30	30	30	30	30
TI_4	Pearson Correlation	,423*	,351	,522**	1	,753**
	Sig. (2-tailed)	,020	,057	,003		,000
	N	30	30	30	30	30
TI	Pearson Correlation	,753**	,707**	,772**	,753**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,715	4

## Correlations

Correlations

		Akuntabilitas_1	Akuntabilitas_2	Akuntabilitas_3	Akuntabilitas_4	Akuntabilitas_5	Akuntabilitas_6	Akuntabilitas
Akuntabilitas_1	Pearson Correlation	1	,116	,317	,337	,279	,543**	,573**
	Sig. (2-tailed)		,542	,088	,069	,135	,002	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30
Akuntabilitas_2	Pearson Correlation	,116	1	,281	,146	,379*	-,113	,549**
	Sig. (2-tailed)	,542		,132	,443	,039	,551	,002
	N	30	30	30	30	30	30	30
Akuntabilitas_3	Pearson Correlation	,317	,281	1	,214	,349	,334	,801**
	Sig. (2-tailed)	,088	,132		,255	,059	,071	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Akuntabilitas_4	Pearson Correlation	,337	,146	,214	1	,877**	,681**	,625**
	Sig. (2-tailed)	,069	,443	,255		,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Akuntabilitas_5	Pearson Correlation	,279	,379*	,349	,877**	1	,598**	,745**
	Sig. (2-tailed)	,135	,039	,059	,000		,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Akuntabilitas_6	Pearson Correlation	,543**	-,113	,334	,681**	,598**	1	,587**
	Sig. (2-tailed)	,002	,551	,071	,000	,000		,001
	N	30	30	30	30	30	30	30
Akuntabilitas	Pearson Correlation	,573**	,549**	,801**	,625**	,745**	,587**	1
	Sig. (2-tailed)	,001	,002	,000	,000	,000	,001	
	N	30	30	30	30	30	30	30

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,636	6

## Lampiran 7

## Hasil pengujian Asumsi Klasik Dan Pengujian Regresi

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,32231118
Most Extreme Differences	Absolute	,210
	Positive	,156
	Negative	-,210
Kolmogorov-Smirnov Z		1,153
Asymp. Sig. (2-tailed)		,140

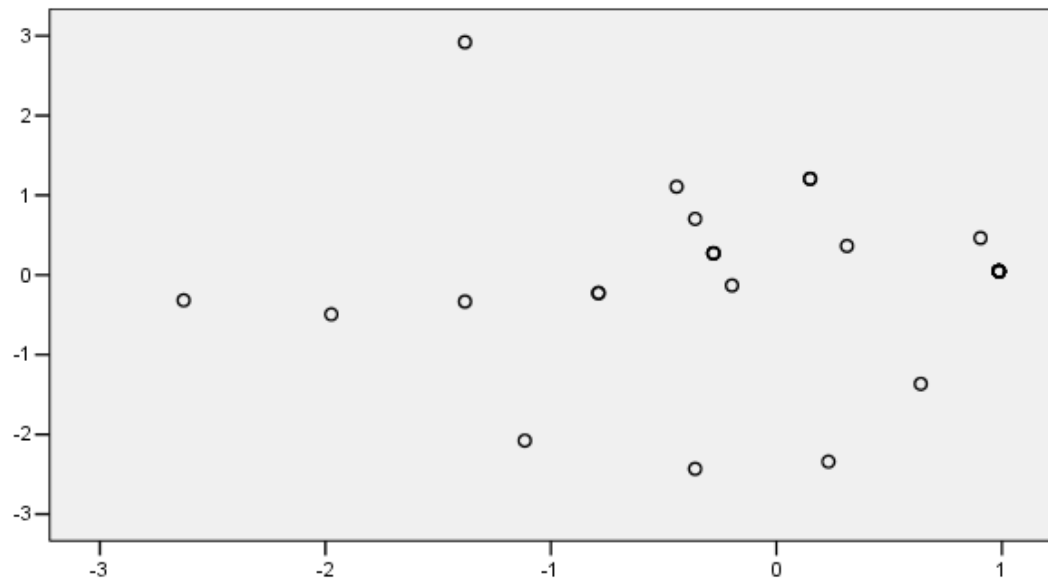
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Sistem Informasi Akuntansi	,115	8,731
	Sistem Pengendalian internal	,198	5,055
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	,192	8,836

a. Dependent Variable: Akuntabilitas



## Regression

### Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian internal, Sistem Informasi Akuntansi <sup>a</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Akuntabilitas

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,981 <sup>a</sup>	,963	,958	,34040

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian internal, Sistem Informasi Akuntansi



**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	77,954	3	25,985	224,255	,000 <sup>a</sup>
	Residual	3,013	26	,116		
	Total	80,967	29			

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian internal, Sistem Informasi Akuntansi

b. Dependent Variable: Akuntabilitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,540	1,564		4,182	,000
	Sistem Informasi Akuntansi	,268	,106	,282	2,525	,018
	Sistem Pengendalian internal	,134	,059	,193	2,269	,032
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	,568	,133	,534	4,286	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas